



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKjIP

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Magelang

TAHUN ANGGARAN 2024

 <https://bpbdmagelangkota.go.id>

 bpbdkotamagelang@gmail.com

 (0293) 319 3701

Jl. Lamtoro No.71, Tidar Baru, Kota Magelang

PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2024. Penyusunan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pertanggungjawaban pelaksanaan tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dapat dilihat dari capaian kinerja serta memberikan gambaran dan memberikan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana untuk tahun – tahun kedepan. Penyusunan LKjIP tahun 2024 merupakan dokumen LKjIP yang tahun ke tiga disusun sehingga dalam penyelenggaraan penanggulangan penanggulangan bencana masih banyak kekurangan, kelemahan baik dari sisi perencanaan penganggaran maupun pelaksanaan tugas kebencanaan.

Terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak atas tersusunnya dokumen ini, semoga dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ini bisa memberikan manfaat , khususnya bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang untuk menentukan rencana aksi yang lebih terarah dan lebih baik.

Magelang, 31 Januari 2025
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kota Magelang



Machbub Yani Arfian, S.Pd
NIP. 19651203 198902 1 001

Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Tahun 2024 merupakan wujud pertanggungjawaban yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dan sasaran strategis. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang mendukung misi ke 5 atas RPJMD Kota Magelang tahun 2021 – 2026 merupakan tahun ke tiga dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja sasaran yang telah dicapai pada tahun 2024 merupakan capaian yang cukup baik dan meningkat dimana sasaran tersebut didukung langsung oleh satu-satunya program yang ada pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan satu program pendukung yang terdiri 9 kegiatan dan 39 sub kegiatan dengan total anggaran Rp 4.592.438.879,- terserap Rp. 4.422.939.211,- atau sebesar 96.31% .dengan satu sasaran yang termuat di dalam Rencana Strategis Badan Pananggulangan Bencana Daerah “ Meningkatkan Kapasitas Penanggulangan Bencana” . dengan target menurut target RPJMD taun 2024 sebesar 47.40 tercapai 48 atau sebesar 101.27% sedangkan target yang ditetapkan perangkat daerah sebesar 41 tercapai 48 atau sebesar 117.07% yang terdiri dari tujuh prioritas dengan variable penilaian Indeks Ketahanan daerah :

1. Indeks Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan tercapai : 0.79
2. Indeks Risiko dan Perencanaan Terpadu tercapai : 0.70
3. Indeks Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik tercapai : 0.63
4. Indeks Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bnecana tercapai : 0.75
5. Indeks Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana tercapai : 0.44
6. Indeks Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana tercapai : 0.34
7. Indeks Sistem Pemulihan Bencana tercapai : 0.36

Sehingga dari hasil perhitungan ketujuh parameter tersebut menjadi hasil akhir 0.48

Jika dibandingkan dengan sasaran tahun sebelumnya , tahun 2023, target sasaran sebesar 33.20 dan tercapai 39, dengan demikian capaian ini telah melampaui target dengan prosentase sebesar 117.47% dengan peningkatan berdasarkan tahun lalu sebesar 144.58%

Meskipun target indikator dan sasaran dapat tercapai bahkan melampaui target, namun masih terdapat permasalahan sehingga sasaran tersebut capainnya dapat lebih tinggi, diantaranya :

1. Belum tersedianya mekanisme, sistem informasi pendataan dan pengambilan kebijakan terkait mitigasi bencana baik parsial maupun kawasan dalam rangka pengurangan resiko bencana bagi masyarakat maupun instansi
2. Belum tersedianya dokumen rencana aksi penanggulangan bencana berdasarkan kajian resiko bencana Kota Magelang baik terhadap tingkat potensi bahaya, tingkat kerentanan



maupun pengembangan kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Kota Magelang

3. Belum memiliki kajian kebutuhan Logistik dan Peralatan penanggulangan bencana per jenis potensi bahaya sesuai standart
4. Belum memiliki Standart Operasional Prosedur dalam rangka Penanggulangan Bencana yang memadai dan diatur dalam peraturan walikota guna mengikat kesiapan instansi terkait sesuai tugas pokok dan kewenangannya
5. Belum tersedianya mekanisme pemberian bantuan kepada korban dampak bencana baik saat darurat bencana maupun pasca bencanayang bersumber dari dana APBD sebagaimana diamanatkan dalam UU No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana bahwa pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam rangka penanggulangan bencana
6. Belum tersedianya database masyarakat yang bertempat tinggal pada daerah rawan
7. Belum adanya legalisasi atas dokumen Pengurangan Risiko Bencana yang sudah disusun.
8. Belum adanya Early Warning System (EWS)

Untuk menyelesaikan permasalahan – permasalahan tersebut rencana yang akan dilaksanakan :

1. Pembentukan forum resiko bencana tingkat Kota Magelang sebagai forum terbuka dalam menyampaikan permasalahan kerentanan terhadap resiko bencana dan rencana solusi penanggulangannya. pada tahun 2025
2. Penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kota Magelang yang berisi rencana aksi penanggulangan bencana baik fase prabencana, saat terjadi bencana maupun pasca bencana pada tahun 2025
3. Penyusunan kajian Logistik dan Peralatan Penanggulangan bencana pada tahun 2025
4. Penyusunan Peraturan Walikota tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Tahun 2025
5. Penyusunan Peraturan Wali Kota pemberian bantuan darurat bencana tahun 2025
6. Kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Cacatan Sipil Kota Magelang serta Pendataan mandiri.
7. Usulan Surat Keputusan Wali Kota Magelang tahun 2025 terkait Dokumen Pengurangan Risiko Bencana Tahun yang telah disusun.
8. Diusulkan pada Perubahan Rencana Kerja badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025.
9. Peningkatan koordinasi lintas sektor, agar penyelenggaraan penanggulangan bencana mulai tahap prabencana, saat bencana dan pascabencana memastikan respon cepat, terkoordinasi dan efektif yang secara keseluruhan memberikan dasar yang kuat untuk merespon dengan cepat, mengurangi dampak bencana serta memastikan pemulihan yang lebih baik dan berkelanjutan.



Hasil evaluasi yang termuat dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sangat bermanfaat guna menentukan strategi dan kebijakan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang dalam perbaikan mencapai kinerja pada tahun-tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I	PENDAHULUAN..... 1
	1.1 Cascading 2
	1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Otganisasi 4
	1.3 Tugas, Fungsi dam Peta Jabatan 8
	1.4 Isu - Isu Strategis 17
	1.5 Dukungsn SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran 18
	1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023 ... 28
BAB II	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 29
	2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah 29
	2.2 Strategi dan Arah Kebijakan 30
	2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024 31
	2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 34
	2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja 36
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA 41
	3.1 Capaian Kinerja Tahun 2024 41
	3.2 Capaian Kinerja Lainnya 52
	3.3 Realisasi Anggaran 55
	3.4 Inovasi 55
	3.5 Lintas Sektor 58
BAB IV	PENUTUP 61
	4.1 Simpulan 61
	4.2 Langkah Perbaikan Kinerja 61
LAMPIRAN – LAMPIRAN	63
	Daftar Tabel 63
	Daftar Gambar 64

BAB I

PENDAHULUAN

Bab I berisi :

1. *Cascading*
2. *Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur organisasi*
3. *Tugas, fungsi dan jabatan*
4. *Isu-isu strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 20 2024*

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan elaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/ APBD).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Penanggulangan Bencan Daerah Kota Magelang di susun berdasarkan atas capaian perencanaan tahunan yang telah disusun BPBD yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2024 maupun perubahannya. Dasar hukum penyusunannya meliputi :

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Wali Kota Magelang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai berikut :

1. Memberikan informasi dan pertanggungjawaban hasil kerja dan kinerja pemerintah kepada pemangku kepentingan
2. Memberikan gambaran untuk melakukan evalusi atas perencanaan maupun pelaksanaan program dan kegiatan
3. Untuk mengambil kebijakan dan upaya perbaikan yang berkelanjutan serta merumuskan strategi kedepan



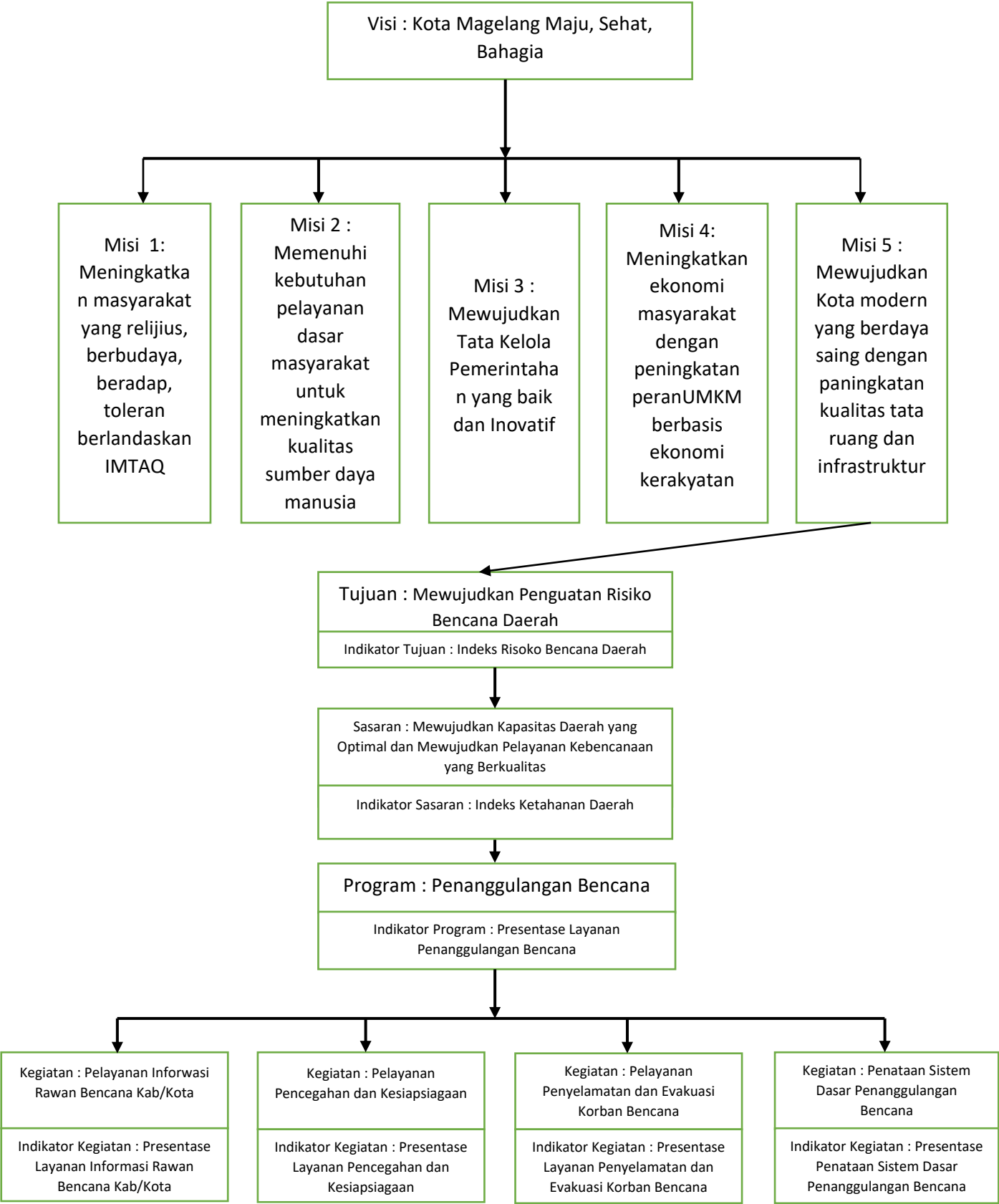
Penyusunan LKjIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Tahun 2024 dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

1.1 Cascading Kinerja sebagai Dasar Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai salah satu OPD yang berkontribusi mendukung pencapaian visi, misi serta tujuan dan sasaran yang teridentifikasi di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 sesuai dengan Peraturan daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2021 meskipun, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang baru berdiri berdiri pada tahun 2022 namun secara jelas sasaran yang terdapat dalam dokumen RPJMD tersebut selaras dengan tugas dan fungsi BPBD Kota Magelang .

Adapaun cascading Kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang sebagai berikut :

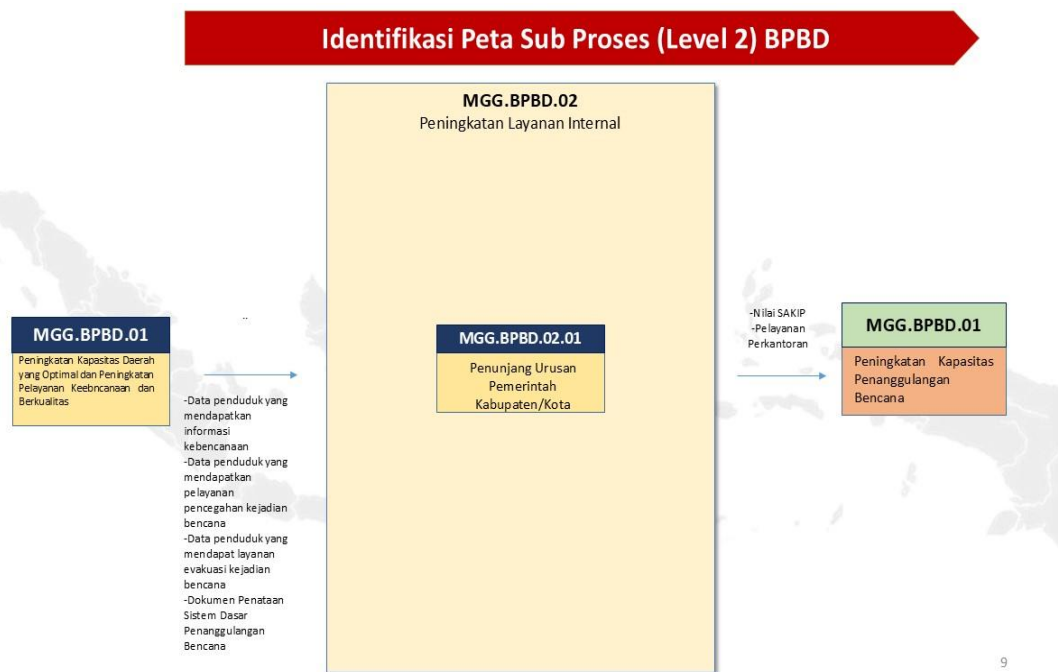
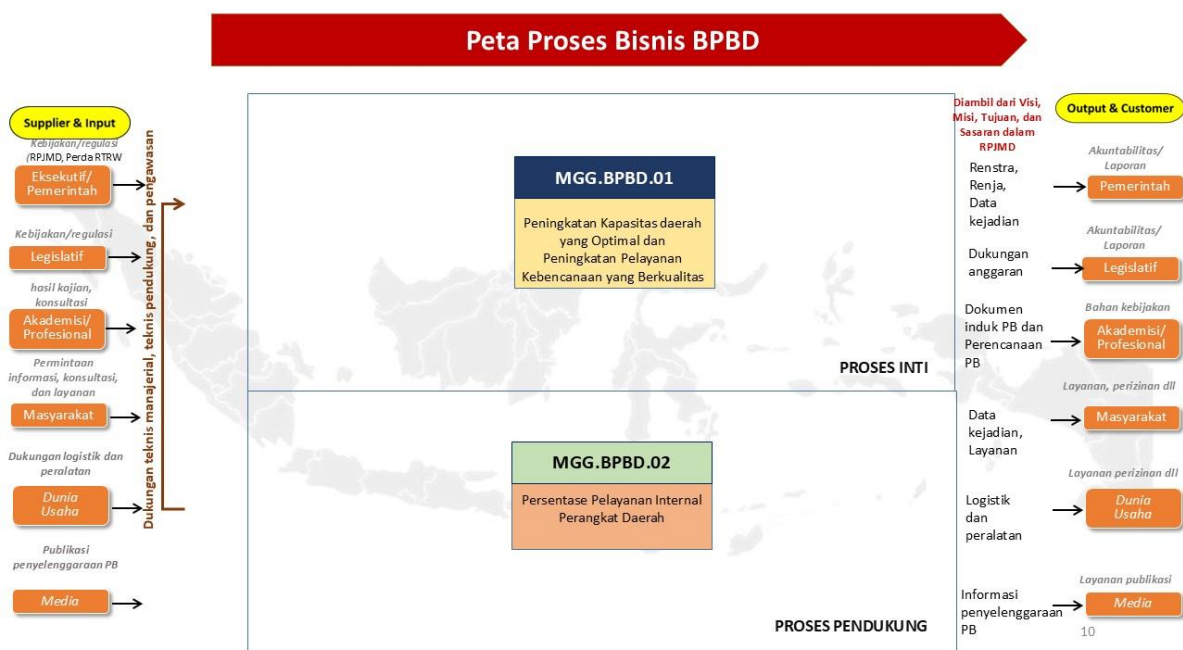
Gambar I.1 Cascading Kinerja



1.2. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

Mandat kinerja mengarahkan organisasi untuk mencapai hasil tertentu , peta proses bisnis merupakan alur kerja dalam organisasi yang mengggambarkan proses berjalan serta langkah – langkah yang diperlukan untuk mencapa tujuan sedangkan struktur organisasi menentukan bagaimana informasi dan wewenang mangalir di dalam organisasi sebagaimana proses bisnis dijalankan, struktur organisasi yang jelas dan efektif akan mandukung pancapaian mandat kinerja dengan memastikan setiap bagian organisasi bekerja. Mandat kinerja, peta proses bisnis dan dan struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang dapat dilihat pada gambara berikut :

Gambar I.2
Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis BPBD Kota Magelang





8

IDENTIFIKASI PETA LINTAS FUNGSI					
Peta Sub Proses	Kode Peta Sub Proses	Peta Lintas Fungsi (Level 2)	Kode Lintas Fungsi	Peta Lintas Fungsi (Level 3)	Kode Peta Lintas Fungsi
Program Penanggulangan Bencana	MGG.BPBD.01.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	MGG.BPBD.01.01.CFM.04	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kab/Kota	MGG.BPBD.01.01.CFM.03.01
				Penanganan Pascabencana Kab/Kota	MGG.BPBD.01.01.CFM.03.02

IDENTIFIKASI PETA LINTAS FUNGSI					
Peta Sub Proses	Kode Peta Sub Proses	Peta Lintas Fungsi (Level 2)	Kode Lintas Fungsi	Peta Lintas Fungsi (Level 3)	Kode Peta Lintas Fungsi
Program Penanggulangan Bencana	MGG.BPBD.01.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	MGG.BPBD.01.01.CFM.03	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	MGG.BPBD.01.01.CFM.03.01
				Respon Cepat Darurat Bencana Kab/Kota	MGG.BPBD.01.01.CFM.03.02
				Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	MGG.BPBD.01.01.CFM.03.03
				Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kab/Kota	
				Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	MGG.BPBD.01.01.CFM.03.04

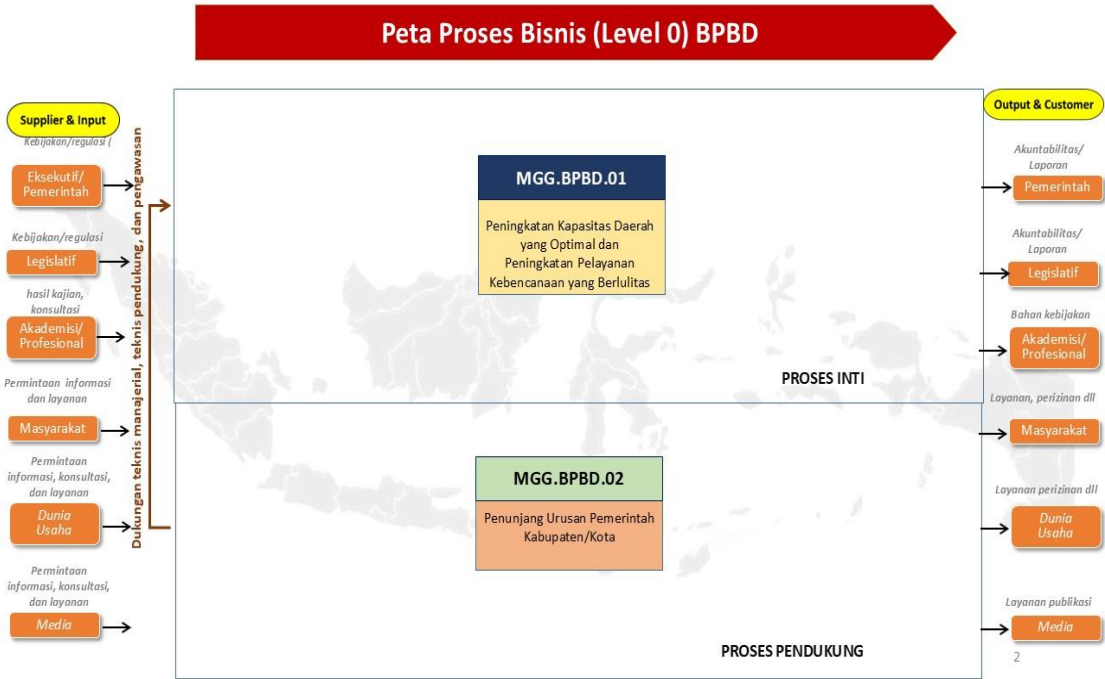
IDENTIFIKASI PETA LINTAS FUNGSI

Peta Sub Proses	Kode Peta Sub Proses	Peta Lintas Fungsi (Level 2)	Kode Lintas Fungsi	Peta Lintas Fungsi (Level 3)	Kode Peta Lintas Fungsi
Progam Penanggulangan Bencana	MGG.BPBD.01.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	MGG.BPBD.01.01.CFM.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kab/Kota	MGG.BPBD.01.01.CFM.02.01
				Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kab/Kota	MGG.BPBD.01.01.CFM.02.02
				Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	MGG.BPBD.01.01.CFM.02.03
				Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	MGG.BPBD.01.01.CFM.02.04
				Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kab/Kota	MGG.BPBD.01.01.CFM.02.05
				Penyusunan Rencana Kontijensi	MGG.BPBD.01.01.CFM.02.06
				Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	MGG.BPBD.01.01.CFM.02.07

IDENTIFIKASI PETA LINTAS FUNGSI

Peta Sub Proses	Kode Peta Sub Proses	Peta Lintas Fungsi (Level 2)	Kode Lintas Fungsi	Peta Lintas Fungsi (Level 3)	Kode Peta Lintas Fungsi
Program Penanggulangan Bencana	MGG.BPBD.01.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/Kota	MGG.BPBD.01.01.CFM.01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kab/Kota	MGG.BPBD.01.01.CFM.01.01
				Sosialisasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota	MGG.BPBD.01.01.CFM.01.02

IDENTIFIKASI PETA PROSES BISNIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					
NO	Peta Proses (Sasaran)	Jenis	Kode Peta Proses	Peta Sub Proses	Kode Peta Sub Proses
1	Peningkatan Kapasitas Daerah yang Optimal dan Peningkatan Pelayanan Kebencanaan yang Berkualitas	UTAMA	MGG.BPBD.01	Program Penanggulangan Bencana	MGG.BPBD.01.01
2	Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Pendukung	MGG.BPBD.02	Penyelenggaraan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	MGG.BPBD.02.01

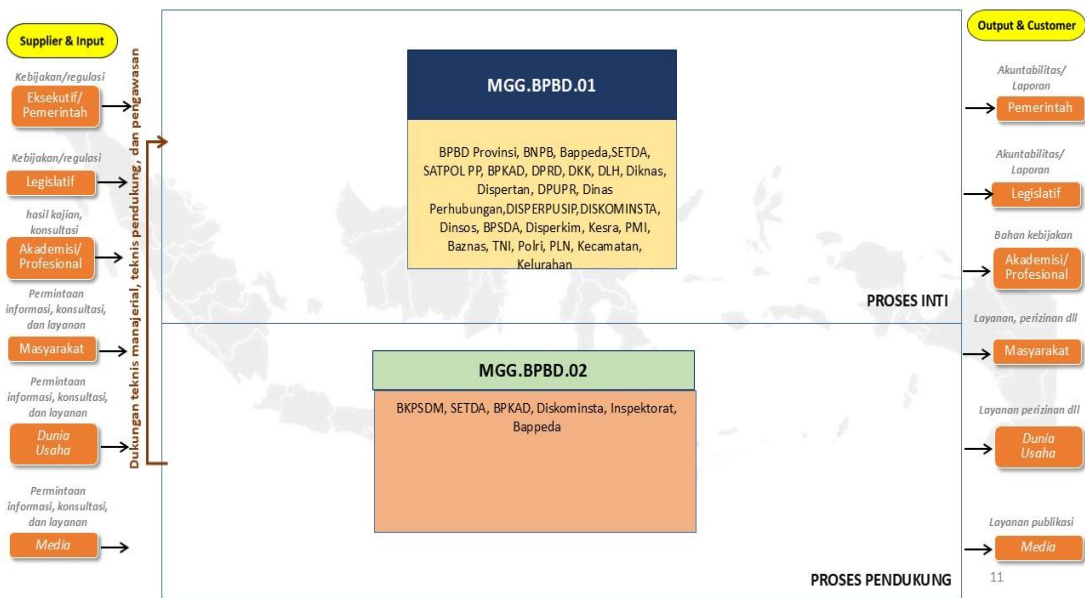


Tabel Instrumen Penentuan Proses

No	Misi	Tujuan	Sasaran	IDENTIFIKASI KAU MAT PROSES	JENIS PROSES (Utama/Pendukung/ Lainnya)	Identifikasi Kalimat Sub Proses	KODE PROSES	ORGANISASI TERKAIT
1	Mewujudkan Kota Modern yang Berdaya Saing dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang dan Infrastruktur	Mewujudkan Penguatan Risiko Bencana Daerah	Mewujudkan Kapasitas Daerah yang Optimal dan Mewujudkan Pelayanan Kebencanaan yang Berkualitas	Peningkatan Kapasitas Daerah yang Optimal dan Peningkatan Pelayanan Kebencanaan yang Berkualitas	Proses Utama	Data Penanggulangan Bencana	MGG.BPBD.01	BPBD Provinsi, BNPB, Bappeda,SETDA, SATPOL PP, BPKAD, DPRD, DKK, DLH, Diknas, Dispertan, DPUPR, Dinas Perhubungan,DISPERPUSIP, DISKOMINSTA, Dinsos, BPSDA, Disperkim, Kesra, PMI, Baznas, TNI, Polri, PLN, Kecamatan, Kelurahan
2			Meningkatnya Layanan Internal	Peningkatan Layanan Internal	Proses Pendukung	Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	MGG.BPBD.02	BKPSDM, SETDA, BPKAD, Diskominsta, Inspektorat, Bappeda

1

PETA RELASI BPBD



11

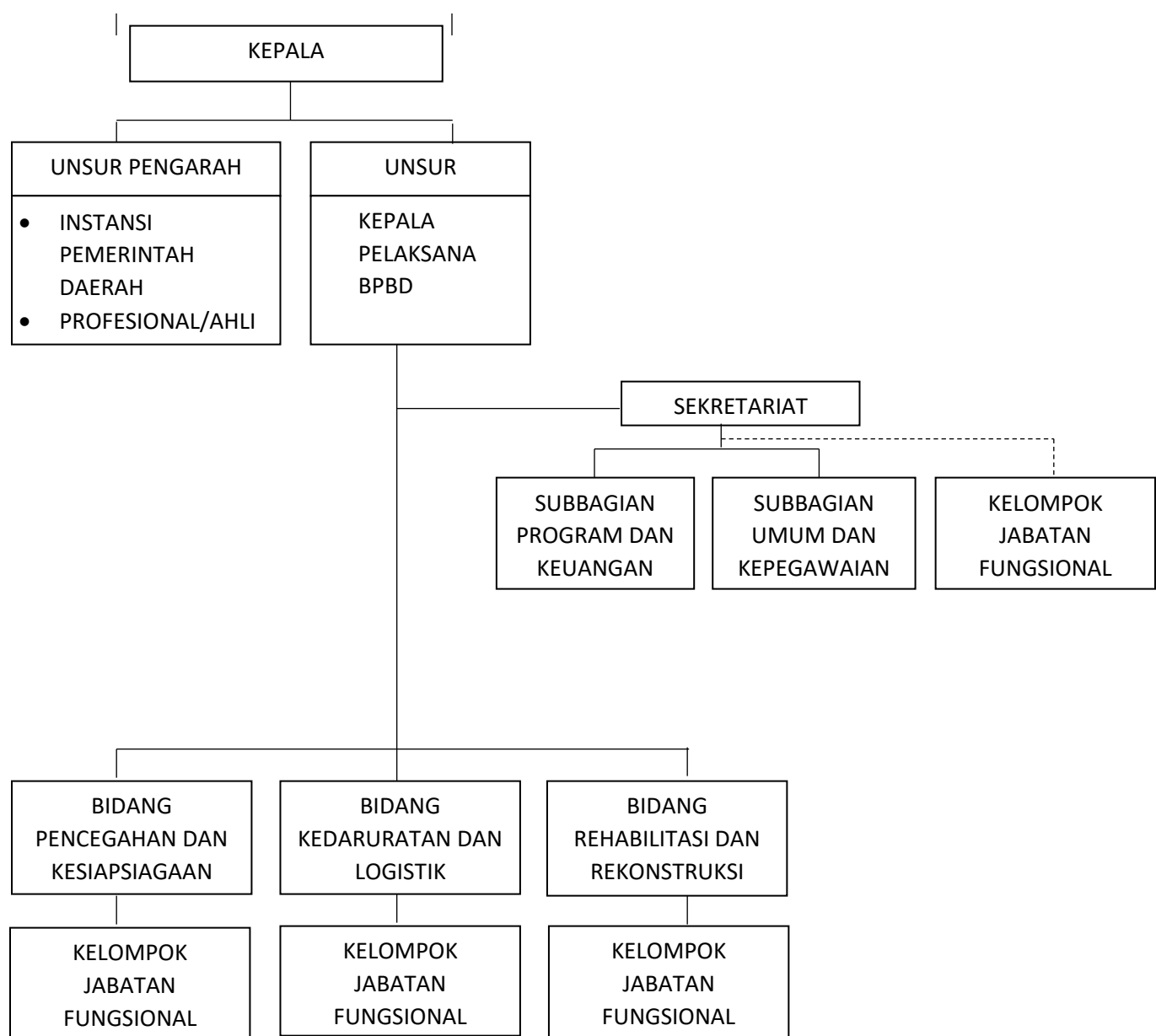
1.3. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

Berdasarkan pasal 5 dan pasal 18 undang- undang 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan maka Pemerintah Kota Magelang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang kemudian sebagai petunjuk pelaksanaan atas peraturan daerah tersebut disusunlan Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang, sejalan dengan perkembangannya maka berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah maka BPBD juga mengalami perubahan struktur organisasi

diatur didalam Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional maka Struktur Organisasi tugas dan fungsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang pun ikut berubah sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang berubah tersebut sebagaimana dalam lampiran :

Gambar 1.3 Struktur Organisasi BPBD Kota Magelang



Sumber data Perwal Nomor 26 Tahun 2022

TUGAS DAN URAIAN TUGAS :

KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas menetapkan kebijakan penanggulangan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana secara terintegrasi.

UNSUR PENGARAH

Unsur Pengarah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. Menyusun prosedur tetap bersama unsur pelaksana mengenai penanganan bencana dan peta rawan bencana;
2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana;
3. Melaksanakan pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana bersama unsur pelaksana sebagai upaya untuk memantau secara terus menerus terhadap proses penanggulangan bencana;
4. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana;
5. Memberikan masukan dan saran di bidang penanggulangan bencana pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat;
6. Memberikan masukan dan saran di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat serta penanganan pengungsi; dan
7. Memberikan masukan dan saran di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

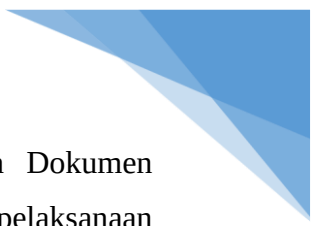
KEPALA PELAKSANA BPBD

TUGAS :

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan penanggulangan bencana daerah meliputi pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana secara terintegrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

URAIAN TUGAS :

- a. merumuskan dan menetapkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) sub urusan bencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;

- 
- b. merumuskan usulan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sub urusan bencana sebagai acuan pelaksanaan kegiatan;
 - c. merumuskan kebijakan sub urusan bencana sesuai dengan program dan kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - d. mengarahkan penyelenggaraan program dan kegiatan bidang bencana sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) agar penyelenggaraannya sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
 - e. mengoordinasikan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
 - f. merumuskan inovasi daerah urusan pemerintah bidang bencana berdasarkan hasil analisa dan atau pemanfaatan teknologi untuk efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - g. mengarahkan penyediaan dan pelayanan informasi publik yang berkaitan dengan urusan pemerintahan bidang bencana sesuai kebutuhan pelayanan publik dalam rangka pemutakhiran informasi publik;
 - h. mengarahkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) urusan pemerintahan bidang bencana sesuai dengan indikator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi;
 - i. mengarahkan pengelolaan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran, ketatausahaan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) bidang bencana agar penyelenggarannya tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
 - j. mengoordinasikan dan bertanggung jawab atas proses pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. menyelenggarakan dan mengendalikan pengelolaan keuangan, kepegawaian, barang milik daerah dan urusan umum di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - l. mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan urusan pemerintahan bidang bencana sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
 - m. merumuskan laporan di bidang bencana berdasarkan data dan analisa sebagai informasi dan pertanggungjawaban Walikota; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.



SEKRETARIS

TUGAS :

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana BPBD dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan serta urusan umum dan kepegawaian di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

URAIAN TUGAS :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Sekretariat;
- b. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. Mengoordinasikan penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. Mengoordinasikan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkup Sekretariat;
- f. Memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh bidang di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Melaksanakan urusan umum, kerumahtanggaan, perlengkapan dan penatausahaan barang milik daerah di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Melaksanakan urusan administrasi kepegawaian di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. Mengawasi dan mengendalikan program dan kegiatan di lingkup Sekretariat;
- k. Mengoordinasikan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- l. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- m. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat;
- n. Memberi petunjuk, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- o. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sekretariat; dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.



KEPALA SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN

TUGAS :

Kepala Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan penyusunan rencana program dan evaluasi program kerja serta melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

URAIAN TUGAS :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- c. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan usulan dari Sekretariat dan masing-masing bidang;
- d. Melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran berdasarkan usulan dari sekretariat dan masing-masing bidang serta penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran;
- e. Melaksanakan koordinasi dengan masing-masing bidang dalam rangka proses pencairan keuangan terkait pelaksanaan program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. Melaksanakan tertib administrasi pertanggungjawaban keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. Melaksanakan penyusunan laporan keuangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- h. Melaksanakan penyusunan laporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- i. Melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- j. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- k. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Program dan Keuangan;
- l. Memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- m. Melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Subbagian Program dan Keuangan; dan
- n. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

KEPALA SUBBAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

TUGAS :

Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan serta administrasi kepegawaian di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

URAIAN TUGAS :

- a. menyusun rencana program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan urusan surat menyurat dan pengelolaan kearsipan;
- c. melaksanakan urusan rumah tangga dan urusan perlengkapan di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- d. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- e. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- f. memproses administrasi usulan angka kredit bagi tenaga fungsional di lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- g. melaksanakan koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- h. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- i. memberi petunjuk, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan;
- j. melaksanakan tertib administrasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas/kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka mendukung kinerja organisasi.

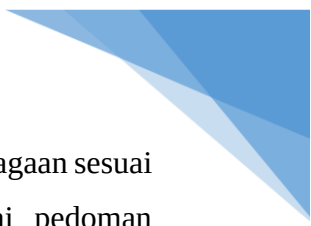
NAMA JABATAN : KEPALA BIDANG PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN

TUGAS :

Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

URAIAN TUGAS :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;

- 
- b. Menyusun konsep rancangan kebijakan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai peraturan tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - c. Menyelenggarakan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan agar tepat sasaran dan tujuan yang telah ditentukan;
 - d. Menyusun rancangan inovasi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - e. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan organisasi guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
 - f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
 - g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka tertib pelaksanaan tugas.

KEPALA BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

TUGAS :

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

URAIAN TUGAS :

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
- b. Menyusun konsep rancangan kebijakan Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai peraturan tentang penanggulangan bencana daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyelenggarakan program dan kegiatan kedaruratan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) guna menunjang kegiatan pelayanan publik;
- d. Menyelenggarakan program dan kegiatan logistik dan peralatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) guna menunjang kegiatan pelayanan publik;

- 
- e. Menyusun rancangan inovasi Bidang Kedaruratan dan Logistik berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - f. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan organisasi guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
 - g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Kedaruratan dan Logistik sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
 - h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kedaruratan dan logistik secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
 - i. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka tertib pelaksanaan tugas.

KEPALA BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI

TUGAS :

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

URAIAN TUGAS :

- a. Merencanakan program dan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan dokumen perencanaan sebagai bahan penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran;
- b. Menyusun konsep rancangan kebijakan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai peraturan tentang penanggulangan bencana daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. Menyelenggarakan program dan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) guna menunjang kegiatan pelayanan publik;
- d. Menyusun rancangan inovasi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan identifikasi permasalahan dan analisa guna efektivitas pelaksanaan pekerjaan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan unit kerja terkait sesuai dengan kebutuhan organisasi guna keterpaduan pelaksanaan tugas;
- f. Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rangka perbaikan kinerja;
- g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi secara efektif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan

- 
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam rangka pelaksanaan tugas.

1.4 Isu – Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Faktor penting lain yang perlu diperhatikan dalam merumuskan isu-isu strategis adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih.

Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Isu Strategis perangkat daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang 2022-2026 sebagai berikut :

- a. Belum adanya sarana dan prasarana tanggap darurat yang lengkap bagi korban bencana
- b. Belum optimalnya pelaksanaan penanganan pascabencana.
- c. Kapasitas sumber daya manusia dalam penanggulangan bencana
- d. Belum adanya regulasi tentang penanggulangan bencana
- e. Belum adanya kejelasan job description terkait tugas dan wewenang dengan pihak terkait dalam penanggulangan bencana
- f. Masih kerap ditemukan ketumpangtindihan terkait wewenang dari pihak yang terlibat
- g. Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat
- h. Sistem informasi dan komunikasi kebencanaan belum terbangun secara terpadu dan terintegrasi
- i. Belum terlaksananya edukasi tanggap bencana di lingkungan masyarakat secara menyeluruh

- j. Masih kurangnya upaya mitigasi, pencegahan , kesiapasiagaan dan pengurangan resiko bencana
- k. Kurangnya kapasitas penanganan masyarakat terdampak bencana
- l. Kapasitas sarana dan prasarana peralatan dan logistik
- m. Rendahnya kesadaran masyarakat
- n. Tidak semua rumah yang dibangun sesuai dengan tingkat kontruksi tahan bencana
- o. Masih terdapat masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana
- p. Belum tersedianya Dokumen Kajian Risiko Bencana yang sah dan legal
- q. Minimnya kesadaran masyarakat tentang kerentanan di daerah tempat tinggal
- r. Masih terdapat masyarakat yang bertempat tinggal di daerah rawan bencana
- s. Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang peringatan dini bencana
- t. Belum terbentuknya masyarakat tanggap bencana di setiap keluarahan
- u. Belum terlaksananya edukasi dan pengetahuan terkait kebencanaan di seluruh lingkungan masyarakat.
- v. Belum terbentuknya Tim Pengkajian Kebutuhan dan Perhitungan Pascabencana (JITUPASNA)
- w. Belum adanya Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)

Namun pada untuk tahun 2023 telah tersusun Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, sedangkan untuk turunannya baru diusulkan pada tahun 2025.

1.5 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

1.5.1 Sumber Daya Manusia

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang memiliki sumber daya manusia :

Tabel 1.5.1.1
ASN berdasarkan Jabatan dan Golongan

NO	Jabatan	Golongan/Ruang					
		II c	III b	III c	III d	IV a	IVc
1	Eselon II b						1
2	Eselon III b					4	
3	Eselon IV a				2		
4	JF			2	3		
5	Fungsional Umum	1	2	1			
Jumlah		1	2	3	5	4	1

Tabel 1.5.1.2
ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin :

NO	Jabatan	Jenis Kelamin		Pendidikan			
		L	P	SMA	D3	S1/D4	S2
1	Eselon II b	1				1	
2	Eselon III b	4				3	1
3	Eselon IV a	1	1			2	
4	JF	3	2			5	
5	Fungsional Umum	3	2	2	2	1	
6	PPPK	1	2	1	2		
	Jumlah	13	7	3	4	12	1

Tabel 1.5.1.3
Pegawai Non ASN Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin :

Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin	
	L	P
SLTA	8	
Sarjana	1	-
Jumlah	9	-

Tabet 1.5.1.4
Jumlah Kebutuhan Pegawai Dibandingkan dengan Kondisi Riil

NO	Nama Jabatan	Jumlah Kebutuhan	Data Saat Ini
1	Kepala	1	1
2	Kepala Pelaksana	1	1
3	Sekretaris	1	1
4	Ka Sub Bag Umum & Kepegawaian	1	1
5	Penelaah Teknis Kebijakan	1	0
6	Pengelola Layanan Oprsaional	1	0
7	Arsiparis Terampil	1	1
8	Pengadministrasian Perkantoran	1	1
9	Ka Sub Bag Program dan Keuangan	1	1
10	Penelaah Teknis Kebijakan	1	0
11	Pengelola Data dan Informasi	1	0
12	Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	1	1

13	Analisis Kebencanaan Ahli Muda	2	2
14	Penelaah Teknis Kebijakan	3	0
15	Pengolah Data dan Informasi	3	0
16	Operator Layanan Operasional	1	0
17	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	1	1
18	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	2	2
19	Penelaah Teknis Kebijakan	3	0
20	Operator Layanan Operasional	2	1
21	Pranata Komputer	1	1
22	Pranata Pencarian dan Pertolongan Pemula	6	1
23	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1	1
24	Penata Penanggulangan Bencana Ahli Muda	2	1
25	Penelaah Teknis Kebijakan	2	0
26	Pengolah Data dan Informasi	2	0

1.5.2 Sarana Prasarana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang yang berlokasi di Jl Lamtoro Nomor 71 Tidar Baru Magersari Kota Magelang, merupakan kantor eks Kantor Dinas Lingkungan Hidup yang memiliki luas tanah : 1530 m² Luas tanah 1780 m² dengan sarana prasarana kebencanaan yang dimiliki :

Tabel 1.5.2.1 Sarana Prasarana

Kode Rekening	Uraian	2024	2023
1.3	ASET TETAP	228.519.356.942	267.356.644.942
1.3.01	Tanah	712.000.000	712.000.000
1.3.01.01	Tanah	712.000.000	712.000.000
1.3.01.01.01	Tanah Persil	712.000.000	712.000.000
1.3.01.01.01.0004	Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	712.000.000	712.000.000
1.3.02	Peralatan dan Mesin	3.028.830.932	3.000.684.932
1.3.02.01	Alat Besar	111.063.000	101.350.000
1.3.02.01.03	Alat Bantu	111.063.000	101.350.000
1.3.02.01.03.0004	Electric Generating Set	104.063.000	94.350.000
1.3.02.01.03.0005	Pompa	7.000.000	7.000.000
1.3.02.02	Alat Angkutan	1.668.754.750	1.668.754.750
1.3.02.02.01	Alat Angkutan Darat Bermotor	1.668.754.750	1.668.754.750
1.3.02.02.01.0001	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	748.254.000	748.254.000
1.3.02.02.01.0003	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	774.466.000	774.466.000

1.3.02.02.01.0004	Kendaraan Bermotor Beroda Dua	146.034.750	146.034.750
1.3.02.03	Alat Bengkel dan Alat Ukur	17.313.000	8.400.000
1.3.02.03.01	Alat Bengkel Bermesin	17.313.000	8.400.000
1.3.02.03.01.0006	Perkakas Bengkel Kayu	17.313.000	8.400.000
1.3.02.05	Alat Kantor dan Rumah Tangga	577.396.957	571.076.957
1.3.02.05.01	Alat Kantor	158.435.501	152.115.501
1.3.02.05.01.0004	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	70.237.501	63.917.501
1.3.02.05.01.0005	Alat Kantor Lainnya	88.198.000	88.198.000
1.3.02.05.02	Alat Rumah Tangga	350.682.856	350.682.856
1.3.02.05.02.0001	Mebel	177.405.000	177.405.000
1.3.02.05.02.0003	Alat Pembersih	3.975.000	3.975.000
1.3.02.05.02.0004	Alat Pendingin	65.631.200	65.631.200
1.3.02.05.02.0005	Alat Dapur	6.733.000	6.733.000
1.3.02.05.02.0006	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	93.283.000	93.283.000
1.3.02.05.02.0007	Alat Pemadam Kebakaran	3.655.656	3.655.656
1.3.02.05.03	Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	68.278.600	68.278.600
1.3.02.05.03.0001	Meja Kerja Pejabat	25.587.300	25.587.300
1.3.02.05.03.0002	Meja Rapat Pejabat	2.670.000	2.670.000
1.3.02.05.03.0003	Kursi Kerja Pejabat	4.665.000	4.665.000
1.3.02.05.03.0005	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	6.541.800	6.541.800
1.3.02.05.03.0007	Lemari dan Arsip Pejabat	28.814.500	28.814.500
1.3.02.06	Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	248.743.000	245.543.000
1.3.02.06.01	Alat Studio	54.143.000	54.143.000
1.3.02.06.01.0001	Peralatan Studio Audio	5.720.000	5.720.000
1.3.02.06.01.0002	Peralatan Studio Video dan Film	48.423.000	48.423.000
1.3.02.06.02	Alat Komunikasi	194.600.000	191.400.000
1.3.02.06.02.0001	Alat Komunikasi Telephone	161.600.000	158.400.000
1.3.02.06.02.0008	Alat Komunikasi Khusus	8.000.000	8.000.000
1.3.02.06.02.0009	Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	25.000.000	25.000.000
1.3.02.07	Alat Kedokteran dan Kesehatan	750.000	750.000
1.3.02.07.01	Alat Kedokteran	750.000	750.000
1.3.02.07.01.0001	Alat Kedokteran Umum	750.000	750.000
1.3.02.10	Komputer	352.010.225	352.010.225
1.3.02.10.01	Komputer Unit	288.365.725	288.365.725
1.3.02.10.01.0002	Personal Computer	288.365.725	288.365.725
1.3.02.10.02	Peralatan Komputer	63.644.500	63.644.500
1.3.02.10.02.0003	Peralatan Personal Computer	63.644.500	63.644.500
1.3.02.15	Alat Keselamatan Kerja	52.800.000	52.800.000
1.3.02.15.03	Alat SAR	52.800.000	52.800.000
1.3.02.15.03.0002	Alat Pendukung Pencarian	52.800.000	52.800.000
1.3.03	Gedung dan Bangunan	926.348.000	926.348.000
1.3.03.01	Bangunan Gedung	926.348.000	926.348.000
1.3.03.01.01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	926.348.000	926.348.000
1.3.03.01.01.0001	Bangunan Gedung Kantor	865.319.550	865.319.550
1.3.03.01.01.0036	Taman	61.028.450	61.028.450
1.3.04	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	36.271.510	36.271.510
1.3.04.02	Bangunan Air	29.478.650	29.478.650
1.3.04.02.06	Bangunan Air Bersih/Air Baku	29.478.650	29.478.650
1.3.04.02.06.0005	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	29.478.650	29.478.650
1.3.04.03	Instalasi	5.842.860	5.842.860
1.3.04.03.01	Instalasi Air Bersih/Air Baku	5.842.860	5.842.860

1.3.04.03.01.0005	Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	5.842.860	5.842.860
1.3.04.04	Jaringan	950.000	950.000
1.3.04.04.03	Jaringan Telepon	950.000	950.000
1.3.04.04.03.0005	Jaringan Telepon Lainnya	950.000	950.000
1.3.07	Akumulasi Penyusutan	(2.418.256.872,58)	(2.001.737.992,58)
1.3.07.01	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(2.123.390.867,31)	(1.723.338.496,31)
1.3.07.01.01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(44.823.285,86)	(28.957.142,86)
1.3.07.01.01.0022	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Electric Generating Set	(41.823.285,86)	(26.957.142,86)
1.3.07.01.01.0023	Akumulasi Penyusutan Alat Bantu-Pompa	-3.000.000	-2.000.000
1.3.07.01.02	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(1.074.692.749,45)	(912.863.321,45)
1.3.07.01.02.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	(591.739.713,86)	(552.611.142,86)
1.3.07.01.02.0003	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	(378.412.571,43)	(267.774.571,43)
1.3.07.01.02.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	(104.540.464,16)	(92.477.607,16)
1.3.07.01.03	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	-4.251.300	-1.680.000
1.3.07.01.03.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Kayu	-4.251.300	-1.680.000
1.3.07.01.05	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	-460.595.757	-382.050.357
1.3.07.01.05.0004	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	-50.047.301	-39.504.301
1.3.07.01.05.0005	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	-73.735.000	-61.350.000
1.3.07.01.05.0006	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Mebel	-135.127.200	-105.189.400
1.3.07.01.05.0008	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	-2.385.000	-1.590.000
1.3.07.01.05.0009	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	-55.403.200	-47.165.200
1.3.07.01.05.0010	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	-4.769.800	-3.788.200
1.3.07.01.05.0011	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	-72.474.000	-62.089.000
1.3.07.01.05.0012	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	-3.655.656	-3.655.656
1.3.07.01.05.0013	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	-25.587.300	-25.587.300
1.3.07.01.05.0014	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Rapat Pejabat	-2.670.000	-2.670.000
1.3.07.01.05.0015	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	-4.665.000	-4.665.000
1.3.07.01.05.0017	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat	-6.541.800	-6.541.800

1.3.07.01.05.0019	Akumulasi Penyusutan Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Lemari dan Arsip Pejabat	-23.534.500	-18.254.500
1.3.07.01.06	Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	-183.746.800	-134.638.200
1.3.07.01.06.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Audio	-3.432.000	-2.288.000
1.3.07.01.06.0002	Akumulasi Penyusutan Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	-33.794.800	-24.110.200
1.3.07.01.06.0007	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	-126.720.000	-95.040.000
1.3.07.01.06.0014	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus	-4.800.000	-3.200.000
1.3.07.01.06.0015	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Digital dan Konvensional	-15.000.000	-10.000.000
1.3.07.01.07	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	-750.000	-600.000
1.3.07.01.07.0001	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	-750.000	-600.000
1.3.07.01.10	Akumulasi Penyusutan Komputer	-301.730.975	-236.149.475
1.3.07.01.10.0002	Akumulasi Penyusutan Komputer Unit-Personal Computer	-243.440.725	-190.459.475
1.3.07.01.10.0006	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	-58.290.250	-45.690.000
1.3.07.01.15	Akumulasi Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	-52.800.000	-26.400.000
1.3.07.01.15.0011	Akumulasi Penyusutan Alat SAR-Alat Pendukung Pencarian	-52.800.000	-26.400.000
1.3.07.02	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(281.800.248,02)	(266.312.967,02)
1.3.07.02.01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(281.800.248,02)	(266.312.967,02)
1.3.07.02.01.0001	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	(261.234.558,02)	(246.967.846,02)
1.3.07.02.01.0036	Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Taman	-20.565.690	-19.345.121
1.3.07.03	Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	(13.065.757,25)	(12.086.529,25)
1.3.07.03.02	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air	(9.336.827,25)	(8.599.861,25)
1.3.07.03.02.0044	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Air Baku-Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku	(9.336.827,25)	(8.599.861,25)
1.3.07.03.03	Akumulasi Penyusutan Instalasi	-2.921.430	-2.726.668
1.3.07.03.03.0005	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	-2.921.430	-2.726.668
1.3.07.03.04	Akumulasi Penyusutan Jaringan	-807.500	-760.000
1.3.07.03.04.0013	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon-Jaringan Telepon Lainnya	-807.500	-760.000
	JUMLAH ASET TETAP	2.285.193.569,42	2.673.566.449,42
1.5	ASET LAINNYA	53.886.060,00	53.886.060,00
1.5.03	Aset Tidak Berwujud	89.810.100,00	89.810.100,00
1.5.03.01	Aset Tidak Berwujud	89.810.100,00	89.810.100,00

1.5.03.01.01	Aset Tidak Berwujud	89.810.100,00	89.810.100,00
1.5.03.01.01.0005	Software	89.810.100,00	89.810.100,00
1.5.05	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(35.924.040,00)	(35.924.040,00)
1.5.05.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(35.924.040,00)	(35.924.040,00)
1.5.05.01.01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(35.924.040,00)	(35.924.040,00)
1.5.05.01.01.0004	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Software	(35.924.040,00)	(35.924.040,00)
	JUMLAH ASET LAINNYA	53.886.060,00	53.886.060,00
	JUMLAH ASET	2.346.646.329,42	2.764.156.776,42

Saat ini, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Magelang untuk mendukung operasional rutin terdiri dari kendaraan operasional lapangan, yakni 1 unit mobil double gardan dan 1 unit pick up. Sementara itu, kendaraan dinas jabatan terdiri dari 3 unit kendaraan roda 4, dengan perincian 1 unit untuk eselon 2 dan 2 unit untuk eselon 3. Namun, kebutuhan kendaraan dinas jabatan belum sepenuhnya merata, di mana untuk jabatan eselon 3 masih terdapat kekurangan 2 unit kendaraan roda 4. Untuk perlengkapan kantor, saat ini sudah cukup memadai, seperti meja dan kursi kerja. Namun, terdapat kebutuhan tambahan berupa penyediaan gudang peralatan yang lebih memadai, lengkap dengan rak dan lemari, karena gudang yang ada saat ini kurang mencukupi.

1.5.3 Anggaran

Tabel 1.5.3.1 Ringkasan APBD SKPD pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Tahun 2024

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024							
Kode Rekening			Uraian	Sebelum	Setelah	Bertambah / Berkurang)	
						Rp	%
5	1		BELANJA OPERASI	Rp4.574.490.026	Rp4.563.895.679	-Rp10.594.347	(0,23)
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp3.143.548.197	Rp3.344.270.370	Rp200.722.173	6,00
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp1.430.941.829	Rp1.219.625.309	-Rp211.316.520	(17,33)
5	2		BELANJA MODAL	Rp53.518.200	Rp28.543.200	-Rp24.975.000	(87,50)
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp38.543.200	Rp28.543.200	-Rp10.000.000	(35,03)
5	2	06	Belanja Modal Aset Lainnya	Rp14.975.000	Rp0	-Rp14.975.000	(100,00)

Tabel 1.5.3.2 Tabel Anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Tahun 2024

Uraian	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Uraian	Sumber Dana	Tahun 2024										Bertambah / Berkurang)	
							Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan						
							Belanja Operasi	Belanja Modal	BTT	Belanja Transfer	Jumlah	Belanja Operasi	Belanja Modal	BTT	Belanja Transfer	Jumlah	Rp	%
1.05.0.00.0.00.23.0000 Badan Penanggulangan Bencana Daerah							4.574.490.026	53.518.200	-	-	4.628.008.226	4.563.895.679	28.543.200	-	-	4.592.438.879	-	(0,77)
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR		4.574.490.026	53.518.200	-	-	4.628.008.226	4.563.895.679	28.543.200	-	-	4.592.438.879	-	(0,77)
1	05				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT		4.574.490.026	53.518.200	-	-	4.628.008.226	4.563.895.679	28.543.200	-	-	4.592.438.879	-	(0,77)
1	05	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		3.708.226.836	14.975.000	-	-	3.723.201.836	3.867.273.487	-	-	-	3.867.273.487	144.071.651	3,73
1	05	01	2,01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		27.939.800	-	-	-	27.939.800	14.373.024	-	-	-	14.373.024	-	(94,39)
1	05	01	2,01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DAU	1.718.500	-	-	-	1.718.500	1.718.500	-	-	-	1.718.500	-	0,00
1	05	01	2,01	0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	DAU	634.000	-	-	-	634.000	634.000	-	-	-	634.000	-	0,00
1	05	01	2,01	0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	DAU	634.000	-	-	-	634.000	634.000	-	-	-	634.000	-	0,00
1	05	01	2,01	0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	DAU	754.800	-	-	-	754.800	754.800	-	-	-	754.800	-	0,00
1	05	01	2,01	0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	DAU	754.800	-	-	-	754.800	754.800	-	-	-	754.800	-	0,00
1	05	01	2,01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	DAU	23.443.700	-	-	-	23.443.700	9.876.924	-	-	-	9.876.924	-	(137,36)
1	05	01	2,02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		3.152.828.297	-	-	-	3.152.828.297	3.352.550.470	-	-	-	3.352.550.470	199.722.173	5,96
1	05	01	2,02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DAU	3.143.548.197	-	-	-	3.143.548.197	3.344.270.370	-	-	-	3.344.270.370	200.722.173	6,00
1	05	01	2,02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	DAU	547.000	-	-	-	547.000	547.000	-	-	-	547.000	-	0,00
1	05	01	2,02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	DAU	8.733.100	-	-	-	8.733.100	7.733.100	-	-	-	7.733.100	-	(12,93)
1	05	01	2,06		Administrasi Umum Perangkat Daerah		120.845.080	-	-	-	120.845.080	118.855.080	-	-	-	118.855.080	-	(1,67)
1	05	01	2,06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DAU	2.388.600	-	-	-	2.388.600	2.388.600	-	-	-	2.388.600	-	0,00
1	05	01	2,06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DAU	4.147.400	-	-	-	4.147.400	4.147.400	-	-	-	4.147.400	-	0,00
1	05	01	2,06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	DAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
1	05	01	2,06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	DAU	22.671.000	-	-	-	22.671.000	21.871.000	-	-	-	21.871.000	800.000	(3,66)
1	05	01	2,06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	DAU	8.407.280	-	-	-	8.407.280	8.407.280	-	-	-	8.407.280	-	0,00
1	05	01	2,06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	DAU	3.660.000	-	-	-	3.660.000	3.360.000	-	-	-	3.360.000	300.000	(8,93)

1	05	01	2,06	0007	Penyediaan Bahan/Material	DAU	10.186.800	-	-	-	10.186.800	10.186.800	-	-	-	10.186.800	-	0,00
1	05	01	2,06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	DAU	1.900.000	-	-	-	1.900.000	1.010.000	-	-	-	1.010.000	890.000	(88,12)
1	05	01	2,06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DAU	67.484.000	-	-	-	67.484.000	67.484.000	-	-	-	67.484.000	-	0,00
1	05	01	2,08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		125.718.152	-	-	-	125.718.152	121.953.578	-	-	-	121.953.578	3.764.574	(3,09)
1	05	01	2,08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DAU	10.627.700	-	-	-	10.627.700	16.331.792	-	-	-	16.331.792	5.704.092	34,93
1	05	01	2,08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DAU	68.274.532	-	-	-	68.274.532	50.774.532	-	-	-	50.774.532	17.500.000	(34,47)
1	05	01	2,08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DAU	46.815.920	-	-	-	46.815.920	54.847.254	-	-	-	54.847.254	8.031.334	14,64
1	05	01	2,09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		280.895.507	14.975.000	-	-	295.870.507	259.541.335	-	-	-	259.541.335	36.329.172	(14,00)
1	05	01	2,09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	DAU	100.143.280	-	-	-	100.143.280	96.603.280	-	-	-	96.603.280	3.540.000	(3,66)
1	05	01	2,09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DAU	50.021.900	-	-	-	50.021.900	35.444.828	-	-	-	35.444.828	14.577.072	(41,13)
1	05	01	2,09	0005	Pemeliharaan Mebel	DAU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
1	05	01	2,09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DAU	11.865.360	-	-	-	11.865.360	11.865.360	-	-	-	11.865.360	-	0,00
1	05	01	2,09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	DAU	-	14.975.000	-	-	14.975.000	-	-	-	-	-	14.975.000	(Infinity)
1	05	01	2,09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	DAU	118.864.967	-	-	-	118.864.967	115.627.867	-	-	-	115.627.867	3.237.100	(2,80)
1	05	03			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		866.263.190	38.543.200	-	-	904.806.390	696.622.192	28.543.200	-	-	725.165.392	179.640.998	(24,77)
1	05	03	2,01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		59.479.400	-	-	-	59.479.400	25.822.800	-	-	-	25.822.800	33.656.600	(130,34)
1	05	03	2,01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Rawan Bencana Kabupaten/Kota Per Jenis Ancaman Bencana)	DAU	59.479.400	-	-	-	59.479.400	25.822.800	-	-	-	25.822.800	33.656.600	(130,34)
1	05	03	2,02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		531.815.690	38.543.200	-	-	570.358.890	447.704.312	28.543.200	-	-	476.247.512	94.111.378	(19,76)
1	05	03	2,02	0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	DAU	117.928.800	-	-	-	117.928.800	26.735.800	-	-	-	26.735.800	91.193.000	(341,09)
1	05	03	2,02	0008	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat TRC Bencana Kabupaten/Kota	DAU	49.475.250	-	-	-	49.475.250	18.312.100	-	-	-	18.312.100	31.163.150	(170,18)
1	05	03	2,02	0009	Penyusunan Rencana Kontijensi	DAU	76.773.600	-	-	-	76.773.600	75.609.900	-	-	-	75.609.900	1.163.700	(1,54)
1	05	03	2,02	0010	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	DAU	13.573.000	-	-	-	13.573.000	35.229.100	-	-	-	35.229.100	21.656.100	61,47
1	05	03	2,02	0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	DAU	30.097.500	25.343.200	-	-	55.440.700	30.097.500	25.343.200	-	-	55.440.700	-	0,00
1	05	03	2,02	0016	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	DAU	66.669.100	-	-	-	66.669.100	56.399.100	-	-	-	56.399.100	10.270.000	(18,21)
1	05	03	2,02	0017	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	DAU	177.298.440	13.200.000	-	-	190.498.440	205.320.812	3.200.000	-	-	208.520.812	18.022.372	8,64
1	05	03	2,03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		225.890.200	-	-	-	225.890.200	198.937.180	-	-	-	198.937.180	26.953.020	(13,55)

1	05	03	2,03	0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	DAU	5.946.600	-	-	-	5.946.600	5.946.600	-	-	-	5.946.600	-	0,00
1	05	03	2,03	0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	DAU	150.742.320	-	-	-	150.742.320	148.515.300	-	-	-	148.515.300	2.227.020	(1,50)
1	05	03	2,03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	DAU	11.000.000	-	-	-	11.000.000	3.500.000	-	-	-	3.500.000	7.500.000	(214,29)
1	05	03	2,03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	DAU, Insentif Fiskal	32.621.280	-	-	-	32.621.280	32.621.280	-	-	-	32.621.280	-	0,00
1	05	03	2,03	0011	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	DAU	25.580.000	-	-	-	25.580.000	8.354.000	-	-	-	8.354.000	17.226.000	(206,20)
1	05	03	2,04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		49.077.900	-	-	-	49.077.900	24.157.900	-	-	-	24.157.900	24.920.000	(103,15)
1	05	03	2,04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	DAU	49.077.900	-	-	-	49.077.900	24.157.900	-	-	-	24.157.900	24.920.000	(103,15)

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat perubahan pada program kegiatan dan sub-kegiatan. Beberapa sub-kegiatan yang masuk dalam usulan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024, pada tahap verifikasi desk Renja, justru dihapus. Selain itu, beberapa sub-kegiatan mengalami rasionalisasi. Perkembangan-perkembangan tersebut merupakan dampak dari kebijakan daerah, di mana terdapat defisit anggaran daerah yang mengakibatkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menjadi salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdampak. Anggaran penetapan semula sebesar Rp 4.628.008.226,- mengalami penurunan pada anggaran perubahan menjadi Rp 4.592.438.879,- atau turun sebesar 0,77%. Salah satu sub-kegiatan yang sangat dibutuhkan namun tidak terealisasi adalah pengembangan aplikasi Sistem Kentongan, yang merupakan kegiatan yang sangat penting dalam meningkatkan mendukung sistem peringatan dini.

1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Tabel 1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Menyelaraskan Tujuan, Sasaran dan Indikator Resntra dengan IKU dan PK	Akan disesuaikan pada penyusunan Rencana Strategis BPBD Kota Magelang 2025 - 2029
2	Tepat waktu dalam melaksanakan evaluasi capaian kinerja IKU, Program da/Kegiatan/Sib Kegiatan	Telah dilakukan evaluasi atas capaian kinerja IKU, Program/Kegiatan/Sub Kegiatan setiap triwulan

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bab II berisi :

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun (n)
4. Perjanjian Kinerja Tahun (n)
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Rencana Strategis adalah dokumen perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih. Penyusunan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang baru disusun pada tahun 2022 hal ini disebabkan karena keberadaan BPBD Kota Magelang yang baru berdiri pada tahun 2022. Selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah tahunan (RENJA SKPD) dimana penyusunan renja merupakan bentuk pelaksanaan Visi dan Misi Kepala Daerah yang oleh perangkat daerah. Visi Kota Magelang 2021 s.d 2026 “Maju

Sehat dan Bahagia” sebagai dasar perumusan misi Kota Magelang :

1. Mewujudkan Masyarakat yang Religius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq
2. Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Inovatif
4. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan
5. Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Perumusan sasaran dan tujuan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah mengacu pada misi ke-5 (lima), dimana salah satu prioritas arah kebijakan pembangunan tahun 2023 sesuai didalam dokumen RPJMD Kota Magelang 2021-2026 yaitu ketahanan daerah. Ketahanan daerah didalam rumusan RPJMD terdiri dari 2 sasaran salah satunya merupakan sasaran yang menjadi tanggungjawab BPBD Kota Magelang yaitu Meningkatnya Ketahanan Terhadap Bencana , BPBD sebagai OPD yang membidangi urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Bencana bertanggungjawab terhadap salah satu sasaran yang termuat didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang 2021-2026 .

Tabel 2.1
Sasaran Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA)
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	Baseline	TARGET TAHUNAN					
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Ketahanan Daerah (bencana)		Indeks Ketahanan Daerah	0	0	22.90	33.20	47.40	57.40	66.80
		Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	Jumlah Tercapainya Tujuh Prioritas	0	0	22.90	33.20	47.40	57.40	66.80

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan sebuah tindakan dalam proses perencanaan untuk mencapai tujuan tertentu. Kebijakan adalah pedoman dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

1	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1.	Meningkatnya Kapasitas Penanggulangan Bencana	1. Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana melalui penguatan kebijakan dan kelembagaan	1. Peningkatan pemahaman masyarakat dalam penanggulangan bencana
		2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu	2. Meningkatkan pembentukan kelurahan tangguh bencana
		3. Pengembangan sistem informasi	3. Peningkatan kapasitas sumberdaya dalam

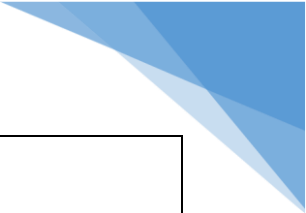
			penanggulangan bencana
		4. Optimalisasi penanganan serta pengembangan sistem pemulihan bencana	4. Peningkatan koordinasi lintas sektor

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

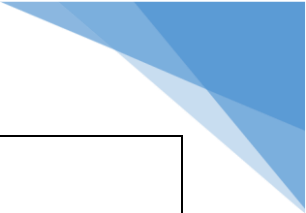
Sasaran jangka menengah BPBD Kota Magelang yang terkait langsung dengan sasaran terdapat pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah “ Mewujudkan Kapasitas Daerah yang Optimal dan Mewujudkan Pelayanan Kebencanaan yang Berkualitas ” dengan struktur Program dan Kegiatan yang langsung mendukung sasaran tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.3 Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024

Sasaran	Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah /Berkurang
Mewujudkan Kapasitas Daerah yang Optimal dan Mewujudkan Pelayanan Kebencnaaan yang Berkualitas	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	904.806.390	725.165.392	-179.640.998
	2.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	59.479.400	25.822.800	-33.656.600
	2.05.03.2.01.0004 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Rawan Bencana Kabupaten/Kota Per Jenis Ancaman Bencana	59.479.400	25.822.800	-33.656.600
	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan	570.358.890	476.247.512	- 94.111.378



	Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			
	1.05.03.2.02.0006 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	117.928.800	26.735.800	-91.193.000
	1.05.03.2.02.0008 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat TRC Bencana Kabupaten/Kota	49.475.250	18.312.100	-31.163.150
	1.05.03.2.02.0009 Penyusunan Rencana Kontijensi	76.773.600	75.609.900	-1.163.700
	1.05.03.2.02.0010 Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	13.573.000	35.2229.100	21.656.100
	1.05.03.2.02.0015 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	55.440.700	55.440.700	0
	1.05.03.2.02.0016 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	66.669.100	56.399.100	-10.270.000
	1.05.03.2.02.0017 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan	190.498.440	208.520.812	18.022.372



	Terhadap Bencana Kabupaten/Kota			
	1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	225.890.440	198.937.180	-26.953.020
	1.05.03.2.03 .0001 Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	5.946.600	5.946.600	0
	1.05.03.2.03 .0002 Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	150.742.320	148.515.300	-2.227.020
	1.05.03.2.03.0003 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	11.000.000	3.500.000	-7.500.000
	1.05.03.2.03.0009 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	32.621.280	32.621.280	0
	1.05.03.2.03.0011 Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	25.580.000	8.354.000	-17.226.000
	1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	49.077.900	24.157.900	-24.920.000

	1.05.03.2.04 Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	49.077.900	24.157.900	-24.920.000
--	--	------------	------------	-------------

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dokumen perjanjian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang merupakan pernyataan komitmen Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang kepada Kepala Daerah dalam hal ini Walikota Magelang tentang target kinerja yang akan dicapai pada tahun 2024. Adapun Target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :

Tabel 2.4.1 Perjanjian Kinerja Kepala Pelaksana BPBD Kota Magelang Tahun 2024
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Penguatan Risiko Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana Daerah	Nilai	98.25
2	Mewujudkan Kapasitas Daerah yang Optimal dan Mewujudkan Pelayanan Kebencanaan yang Berkualitas	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	41

Untuk mendukung target sasaran yang menjadi tanggung jawab Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang terdapat anggaran yang langsung mendukung yaitu Program penanggulangan Bencana dan program yang mendukung target sasaran tahun 2024 dapat di sajikan sebagai berikut :

Tabel 2.4.2 Tabel Program dan Kegiatan yang Mendukung Sasaran Tahun 2024

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Penanggulangan Bencana	904.806.390
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.723.201.836
Jumlah Anggaran		4.628.008.226

Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Tahun 2024

Tabel 2.4.3 Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Mewujudkan Penguatan Risiko Bencana Daerah	Indeks Risiko Bencana Daerah	Nilai	98.25
2	Mewujudkan Kapasitas Daerah yang Optimal dan Mewujudkan Pelayanan Kebencanaan yang Berkualitas	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	41

Tabel 2.4.4 Program dan Kegiatan Perubahan yang Mendukung Sasaran Tahun 2024

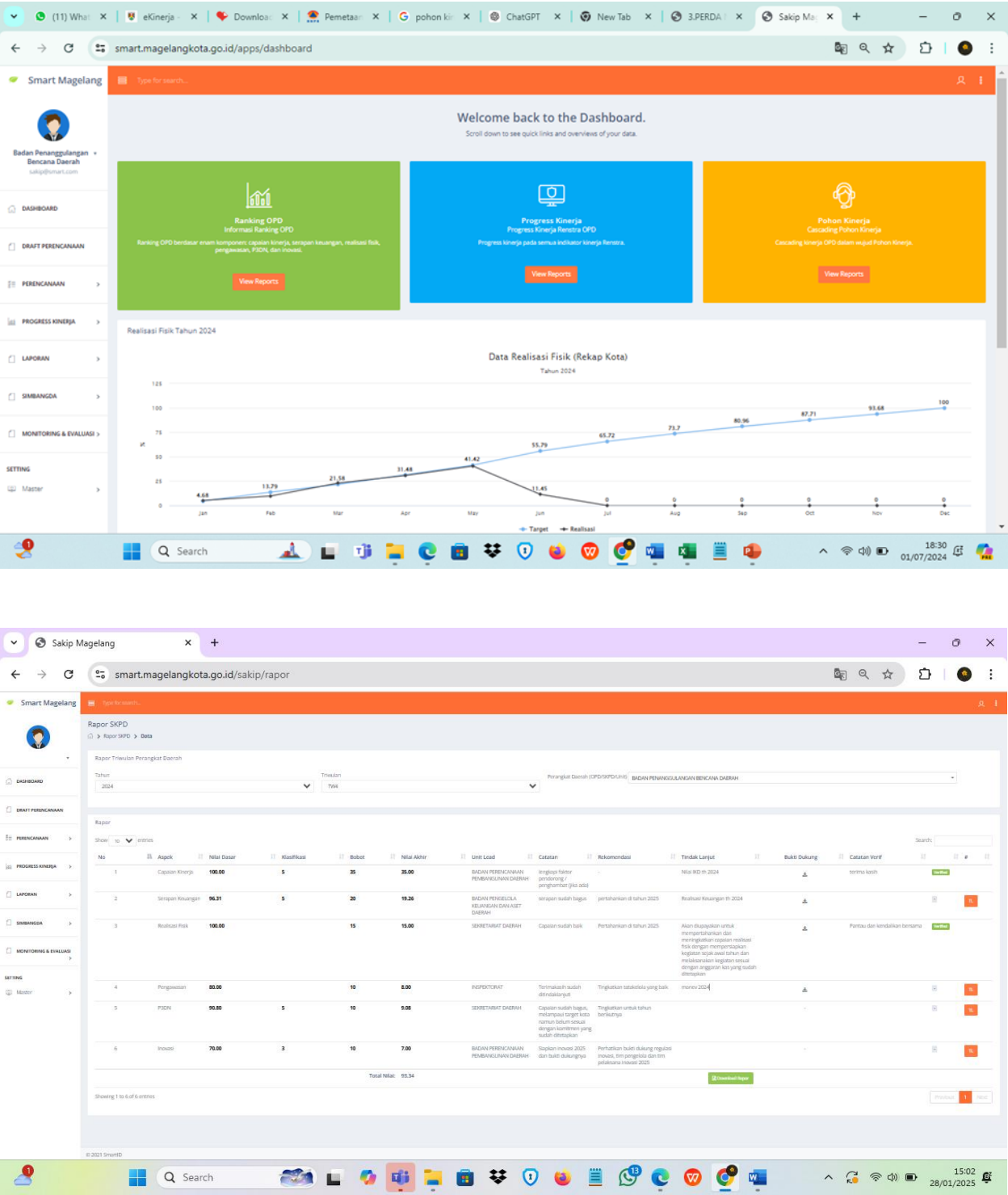
NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Penanggulangan Bencana	725.165.392
2	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.867.273.487

Jumlah Anggaran	4.628.008.226
-----------------	---------------

2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

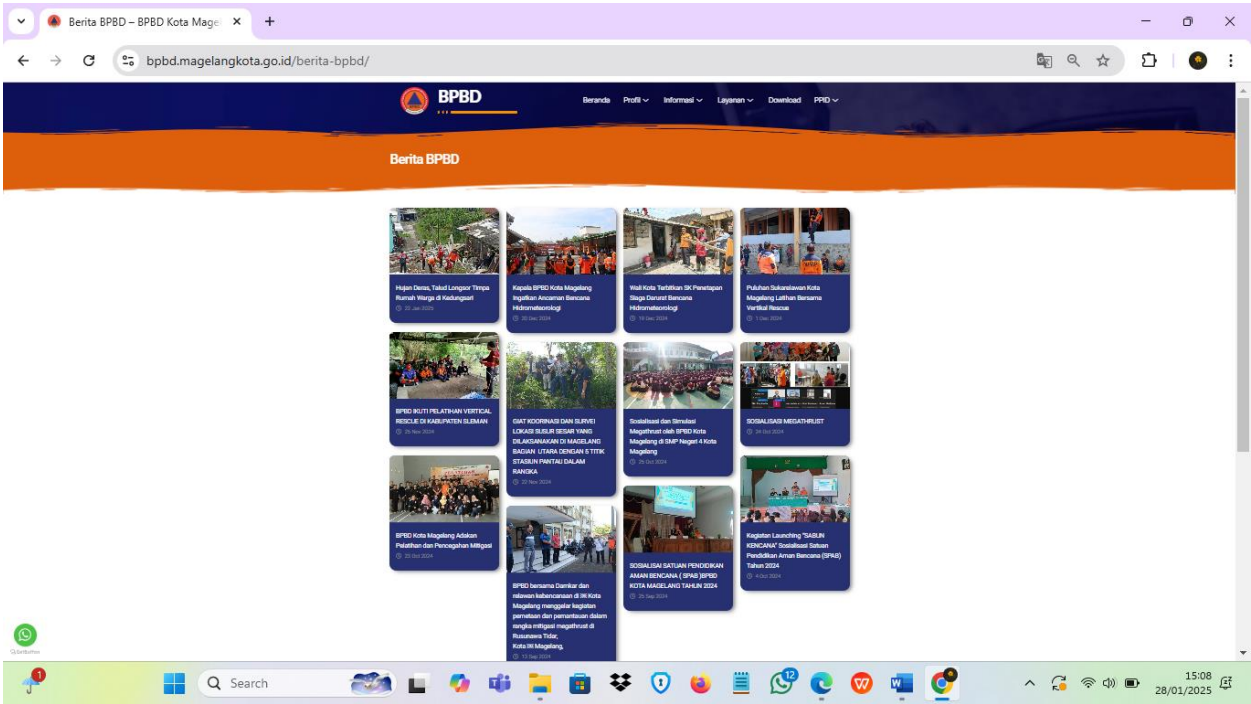
- a. Instrumen pendukung penerapan SAKIP Kota Magelang adanya sebuah Aplikasi yang dibangun yaitu smart.magelang.go.id , yang bertujuan untuk mengintegrasikan dari perencanaan sampai dengan pengaawasan, yang dapat dipantau setiap saat :

Gambar 2.5.1 SMART MAGELANG

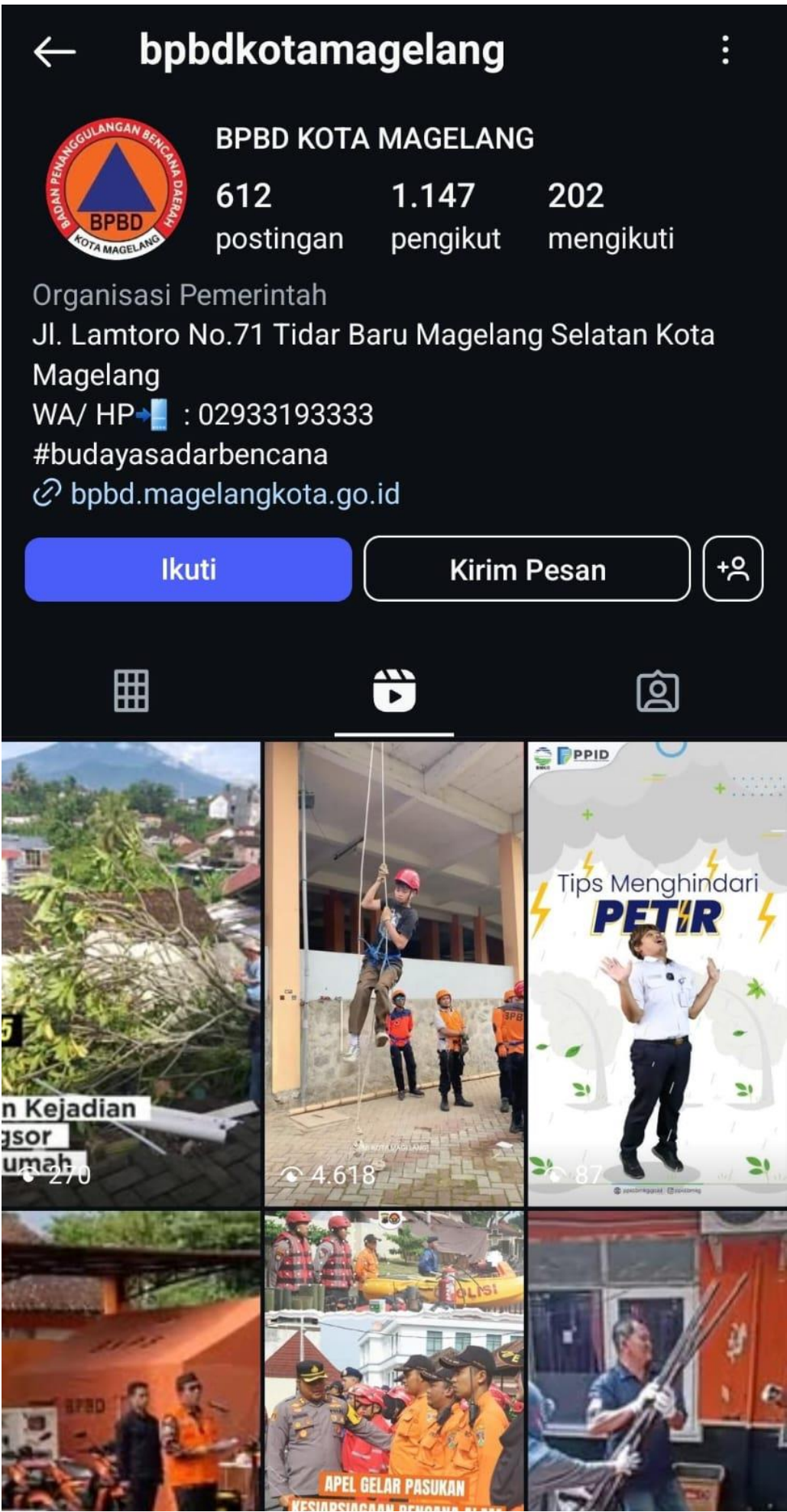


- b. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja Lainnya

Gambar 2.5.2 Website BPBD



Gambar 2.5.3 Instagram BPBD



Gambar 2.5.4 Twitter/X BPBD

SIAP UNTUK SELAMAT

"Tingkatkan Ketangguhan Desa, Kurangi Risiko Bencana"

Ikuti

BPBD Kota Magelang

@BPBDKotaMgl

Badan Penanggulangan Bencana Kota Magelang. Hubungi Call Center Kedaruratan 112

Kota Magelang, Jawa Tengah

bcbd.magelangkota.go.id

Bergabung April 2023

194 Mengikuti

31 Pengikut

Tidak diikuti oleh siapa pun yang Anda ikuti

Postingan

Balasan

Media

Disematkan

BPBD Kota Magelang @B...

· 26 Apr 23

⋮

Peringatan Hari Kesiapsiagaan Bencana, 26 April 2023 di BPBD Kota Magelang. Siap Untuk Selamat. Mari kita tingkatkan ketangguhan desa, untuk mengurangi resiko bencana.

#salamtangguh

#salamkemanuisaan

#salamsiaga

← Posting

📌 Disematkan



BPBD Kota Magelang
@BPBDKotaMgl

Ikuti

Peringatan Hari Kesiapsiagaan
Bencana, 26 April 2023 di BPBD Kota
Magelang. Siap Untuk Selamat. Mari
kita tingkatkan ketangguhan desa,
untuk mengurangi resiko bencana.

#salamtangguh
#salamkemanuisaan
#salamsiaga



11:22 · 26 Apr 23 · **214** Tayangan



**BAB
III**

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Bab III berisi :

- 1. *Capaian kinerja tahun 2024*
- 2. *Capaian Kinerja Lainnya*
- 3. *Realisasi Anggaran*
- 4. *Inovasi*
- 5. *Lintas sektor*

Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaan/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. BPBD melaksanakan pelayanan dasar urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan bencana. Definisi Bencana menurut undang-undang 24 tahun 2007 tentang Penanggulanga Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor manusia sehingga mengakibatkan timmbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis. Bencana diklasifikasikan menjadi 3 jenis :

- 1. Bencana alam : bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsonr
- 2. Bencana non alam : bencana yang diakibatkan ooleh peristiwa atau serangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan atau wabah penyakit.
- 3. Bencana sosial : bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar antar komunitas masyarakat, dan teror.

Pada perencanaan tahun 2024 BPBD Kota Magelang guna mendukung capaian sasaran OPD melaksanakan 2 program dan 9 kegiatan, namun begitu guna mencapai sasaran memenuhi pelayanan dasar sampai dengan dengan akhir periode perencanaan jangka menengah masih perlu adanya dukungan anggaran lebih.

Sepanjang tahun 2024 kejadian bencana di Kota Magelang terdapat 56 kejadian Dimana 15 diantaranya merupakan akibat kebakaran lahan,. Jika dilihat dari dampak negatif akibat bencana di Kota Magelang tidak dalam skala besar namun karena menurut IRBI Kota Magelang termasuk dalam Resiko Sedang, maka perlu adanya upaya agar Indeks Risiko Bencana di Kota Magelang turun. Menurut hasil penilaian IKD dan IRBI tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Badan Nasisonal Penanggulangan

Bencana dengan surat nomor B-06.13/BNPB/D-I/SS.01.03/01/2025 tanggal 8 Januari 2025 dan disampaikan kepada seluruh perencana OPD di Jawa Tengah via grup WA pada tanggal 10 Januari 2024. IRBI Kota Magelang tahun 2023 turun sebesar 8.73 dari 102.08 pada tahun 2023 menjadi 93.35 pada tahun 2024, sedangkan IKD Kota Magelang naik 9 dari 0.39 pada tahun 2023 menjadi 0.48 pada tahun 2024.

Pengkajian Risiko Bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan. Secara matematis, perhitungan potensi risiko dapat dilihat pada rumus berikut:

$$\text{Risiko} = \text{HAZARD} \times \frac{\text{VULNERABILITY}}{\text{CAPACITY}}$$

Dimana Hazard (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magtitude) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dll.

Vulnerability (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan.

Capacity (kapasitas) dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu :

1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan
2. Pengkajian Resiko dan perencanaan terpadu
3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik
4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana
5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana
6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana
7. Pengembangan Sistem pemulihan bencana

Penilaian Indesk Risiko Bencanan diukur utamanya berdasarkan perubahan pada komponen kapasitas. Nilai Kapasitas berdasarkan pengukuran Indeks Kapasitas Daerah (IKD), sehingga dapat disimpulkan bahwa dengan Nilai Kapasitas Daerah Tinggi berbanding terbalik dengan hasil penilaian Indeks Risiko Bencana, dengan pencapaian nilai Indeks Ketahanan Daerah tinggi maka nilai Risiko Bencana menjadi turun.

Hasil penilaian dan informasi tingkat risiko bencana dapat digunakan untuk menganalisis sebagai dasar pembentukan kebijakan kelembagaan, kegiatan, perencanaan, statistik dan operasional penanggulangan bencana. Hasil penilaian dari Indeks Risiko Bencana juga memberikan gambaran capaian program penanggulangan bencana yang sudah dilakukan di tingkat daerah , berupa penurunan risiko bencana.

Hasil penilaian Kapasitas Daerah sesuai dengan portal yang dimiliki oleh BNPB bahwa Kapasitas Daerah Kota Magelang pada tahun 2022 masih dalam kategori rendah, hal tersebut dapat dimaklumi, mengingat BPBD Kota Magelang baru berdiri pada tahun 2022 dengan kapasitas SDM, Sarana Prasarana yang masih rendah, namun seiring dengan berdirinya BPBD pada awal tahun 2022, nilai Kapasitas Daerah menjadi naik, dalam kategori **sedang**.

Pengukuran kinerja sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Analisis capaian kinerja Indikator Kinerja Utama dari hasil penilaian dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang pelaksanaannya di lakukan setiap, untuk pencapaian tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Penilaian pengukuran kinerja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2027 tentang Tata Cata Perencaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1.1 Skala Nilai Perangkat Daerah

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50



Tabel 3.1.2

Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Tahun 2024:

No	Sasaran Strategis	Indikator/Meta Indikator	Satuan	Baseline % Capaian	Th 2022			Th 2023			Tah 2024		
					Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1	Tujuan : Mewujudkan Penguatan Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana Daerah	Nilai	108	108	108	100%	108	102.08	94.52%	84.98	93.35	109.85%
	Mewujudkan Kapasitas Daeah yang Optimal dan Mewujudkan Pelayanan Kebencanaan yang Berkualitas	Indeks Ketahanan Daerah	Nilai	37.30	22.90	35	152.84%	33,20	39	117.47%	47.40	48	101.27%

Tabet 3.1.3 Rumusan Indikator dan Formula Perhitungan

No	Sasaran	Indikator	Meta Indikator
1	Meningkatnya Ketahanan Daerah Dalam Menghadapi Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	1. Indeks Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan yang terdiri dari sembilan indikator 9 indikator
			2. Indeks Pengkajian Risiko dan Perencanaan yang terdiri dari 4 indikator
			3. Indeks Pengembangan Sistem Informasi , Diklat dan Logistik yang terdiri dari 13 indikator
			4. Indeks Penangana Temasik Kawasan Rawan Bencana yang terdiri dari 5 indikator
			5. Indeks Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana yang terdiri dari 12 indikator
			6. Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana yang terdiri dari 24 indikator
			7. Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana yang terdiri dari 4 indikator

Tabel 3.1.4 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 terhadap Sasaran

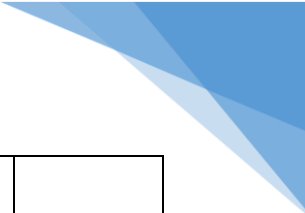
No	Indikator Sasaraan	Capaian Tahun 2022	Tahun 2024			Target Akhir Renstra	Capaian s/d tahun 2024 terhadap Target Akhir Renstra
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	Meningkatnya Kapasitas Daerah yang Optimal dan Mewujudkan Pelayanan Kebencanaan yang Berkualitas	25	44.70	48	101.27%	66.80	139.17

Tabel 3.1.5 Capaian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terhadap Sasaran

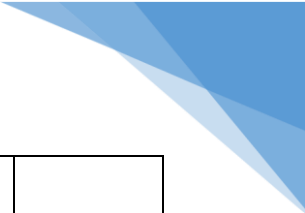
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran			Tingkat Efisiensi
							Anggaran	Realisasi	% Capaian	
1	Progran Penanggulangan Bencana		Presentase Layanan Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	725.165.392	689.397.874	95.07%	4.93%
	1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Layanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	25.822.800	25.763.500	99.77%	2.35%
		1 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIE Rawan Bencana Kabupaten/Kota Per Jenis Ancaman Bencana)	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentandi kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancamanbencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	120 Orgn	120 Org	100%	25.822.800	25.763.500	99.77%	2.35%
	2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Presentase Layanan Pencegahan dan Kesiapsisgaan Terhadap Bencana	100%	100%	100%	476.247.512	471.573.774	99.02%	0.98%
		1 Penguatan Kapasitas Kawasan	Jumlahkawasanrawanbencana(per jenis ancaman bencana) dan/atau	2 Kawasan	2 Kawasa	100%	26.735.800	24.902.000	93.14%	6.86%

			untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana							
		2	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat TRC Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	30 Orang	30 Orang	100%	18.312.100	18.158.600	99.16%	0.84%
		3	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	75.609.900	74.466.870	98.49%	1.51%
		4	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warganegara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	175 Org	175 Orang	100%	35.229.100	34.919.050	99,12%	0.88%

	5	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	20 Unit	20 Unit	100%	55.440.700	54.945.960	99.11%	0.89%
	6	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	2 Kawasan	2 Kawasan	100%	56.399.100	56.160.650	99.58%	0.42%
	7	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	12 Laporan	12 Laporan	100%	208.520.812	208.020.644	99.76%	0.02%
3		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	100%	100%	198.937.180	168.559.200	84.73%	15.27%



		1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	4 Laporan	4 Laporan	100%	5.946.600	5.918.000	99.52%	0.48%
		2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SK PDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat	1 Dokumen	0	0%	148.515.300	129.834.200	87.42%	12.58%
		3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	1 Orang	1 Orang	100%	3.500.000	255.000	8.29%	91.71%
		4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	20 Orang	43 Orang	215%	32.621.280	32.552.000	99.79%	0.21%



		5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1 Laporan	0	0%	8.354.000	0	0%	100%
	4		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Presentase Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100%	100%	100%	24.157.900	23.501.400	97.28%	2.72%
		1	Koordinasi penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencanadisemuasektorsesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi danRekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	12 Kegiatan	13 Kegiatan	108.33%	24.157.900	23.501.400	97.28%	2.72%

3.2 Capaian Kinerja Lainnya

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan OPD yang masuk urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang terdiri atas 3 p3layan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Thun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Kanupaten/Kota yang terdiri dari :

- 1. Pelayan Isformasi Rawan Bencana
- 2. Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap Bencana
- 3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Adapun Capain Kinerja SPM sub Urusan bencana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.1 Capaian Kinerja SPM Sub – Urusan Bencana

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja Tahun 2023	Tahun 2024		
				Target	Realisasi	Kinerja
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	100%	100%	100%	100%
		A. Jumlah yang harus dilayani	100%	100%	100%	120 Orang
		B. Jumlah Mutu	100%	100%	100%	1 Dokumen KRB 50 Org WN yg tinggal di daerah rawan bencana 120 Orang yag mendapatkan sosialisasi (KIE) 1 Rambu evakuasi
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Presentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	100%	100%	100%	100%
		A. Jumlah yang harus dilayani	100%	100%	100%	445 Orang
		B. Jumlah Mutu	100%	100%	100%	4 Sarana prasarana Penanggulangan Bencana 381 orang yang mendapatkan kapasistas peningkatan personil
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	-	100%	100%	100%	100%

Penanggulangan Bencana selain masuk sebagai salan satu Pelayanan Dasar, penangulangan bencana juga merupakan bagian dari upaya mencapai Suistenable Development Goals (SDGs)/Tujunan Pembangunan Berkelanjutan, kaena bencana yang tidak tertangani dengan baik dapat merusak pembangunan. Adapun tujuan SDGs yang berfokus pada pengurangan risiko bencna dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.2.2 Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ Sustainable Development Goals (SDGs)

No	Tujuan TPB	Kode Indikator TPB	Indikator TPB	Realisasi 2023	Realisasi 2024
1	Tujuan 1 : Mengurangi Kemiskinan	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	0	0
		1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) Tingkat kab/kota	1. Kajian Risiko Bencana 1 dok 2. Rencana Kontijensi Angin 1 dok 3. Rencana Kontijensi Longsor 1 dok	1. Rencana Konjensi Kebakaran Hutan dan Lahan 1 dok
2	Tujuan 11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	0	0
		11.5.2.(a)	Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relative terhadap PDRB	25.04%	102.30%
3	Tujuan 13 : Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Kebencanaan	13.1.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang	0	0

Tabel 3.2.3 Tabel Kontribusi Sasaran Perangkat Daerah terhadap Capaian sasaran Pemerintah Kota Magelang

No	Pemerintah Daerah				Perangkat Daerah			
	Sasaran Pemerintah Daerah	Indikator Sasaran Pemerintah Daerah	Target	Realisasi	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Sasaran Perangkat Daerah	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Ketahanan terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah	44.70	48	Mewujudkan Kapasitas Daerah yang Optimal dan Mewujudkan Pelayanan Kebencanaan yang Berkualitas	Indeks Ketahanan Daerah	41	48

Tabel 3.2.4 Kontribusi Program Perangkat Daerah terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Daerah

No	Program Unggulan Pemerintah Daerah	Perangkat Daerah				
		Program Perangkat Daerah	Indikator Program Perangkat Daerah	Target	Realisasi	% Realisasi
1	RODANYA MAS BAGYA Program Pemberdayaan Masyarakat Maju, Sehat & Bahagia	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancamanbencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun	120 Orang	120 Orang	100%
			Jumlah warga negarayang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan daruratbencana (per jenisancaman) Kabupaten/Kota	175 Orang	175 Orang	100%
			Jumlah kawasan rawan bencana(per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	2 Kawasan	2 Kawasan	100 %
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untukpenangananawal darurat bencana	30 Orang	30 Orang	100%
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan	2 Kawasan	2 Kawasan	100%

			rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana			
--	--	--	---	--	--	--

3.3 Realisasi Anggaran

Tabel 3.3 Realisasi Anggaran

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	
1	Mewujudkan Kapasitas Daerah yang Optimaal dan Mewujudkan Pelayanan Kebencanaan yang Berkualitas	Indeks Ketahanan Daerah	41	48	117.07%	725.165.392	689.397.874	95.07%	4.93%

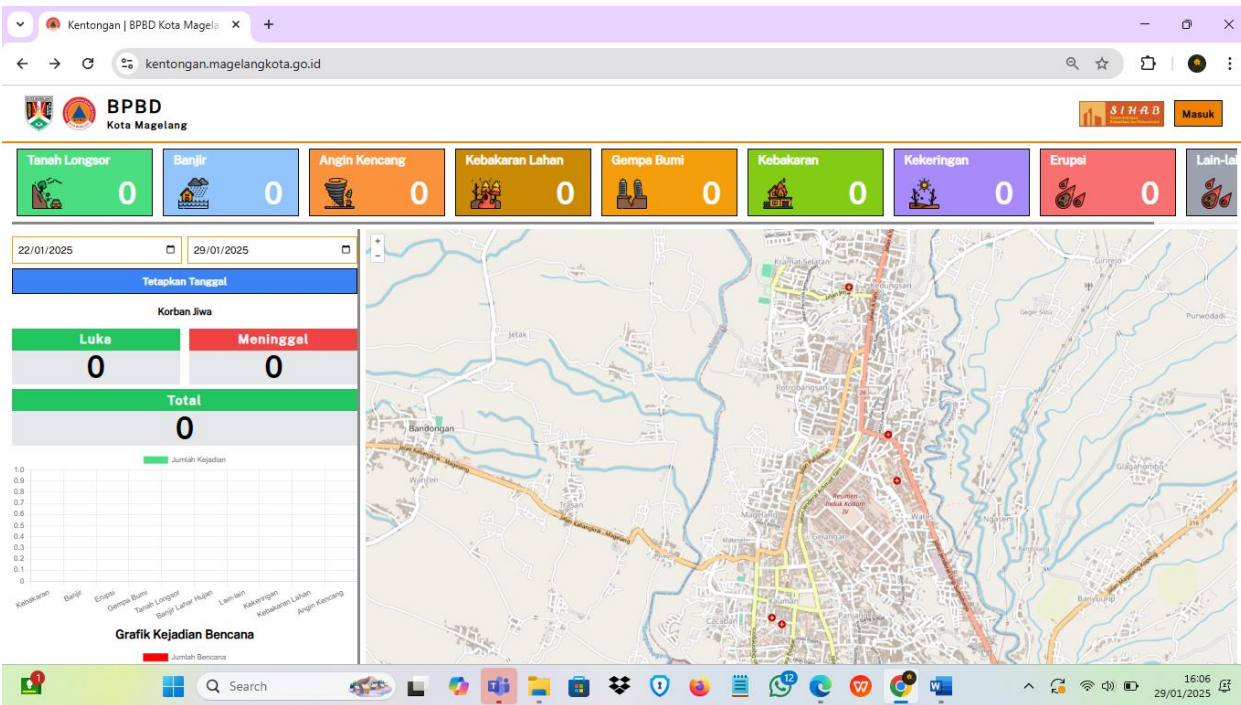
3.4 Inovasi

Inovasi merupakan salah satu upaya dalam mencapai target kinerja OPD selain atas dukungan anggaran, Dengan berdirinya BPBD Kota Magelang yang terhitung masih baru, perlu adanya dukungan anggaran yang cukup, namun demikian bahwa di dalam proses penganggaran terdapat banyak kendala , dan salah satunya kemampuan keuangan daerah, dengan adanya keterbatasan kemampuan keuangan daerah tersebut sangat perlu adanya inovasi bagi BPBD Kota Magelang guna mempercepat capaian targetnya, Inovasi yang telah dikembangkan :

1. Aplikasi Sistem Kebencanaan “KENTONGAN” <https://kentongan.magelangkota.go.id/> adalah. aplikasi/sistem kedaruratan dan pertolongan merupakan sistem informasi kebencanaan Kota Magelang. Pengelolaan informasi menjadi suatu hal yang penting. Data tentang kebencanaan juga menjadi salah satu point penting dalam pengambilan kebijakan baik di organisasi BPBD maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota/Kabupaten. BPBD Kota Magelang berusaha untuk mengelola data tentang kebencanaan itu melalui suatu aplikasi sistem informasi kebencanaan yang bernama Kentongan. Informasi yang dihimpun memuat informasi manajemen penanggulangan bencana mulai dari pra bencana, tanggap darurat dan pascabencana. Informasi pada saat pra bencana meliputi informasi pemetaan lokasi rawan bencana, yang ditampilkan dalam peta rawan bencana, serta rencana kedepannya memuat informasi tentang jalur evakuasi, informasi tentang proyeksi tempat kumpul atau tempat evakuasi sementara ketika terjadi bencana. Informasi yang dihimpun saat tanggap darurat

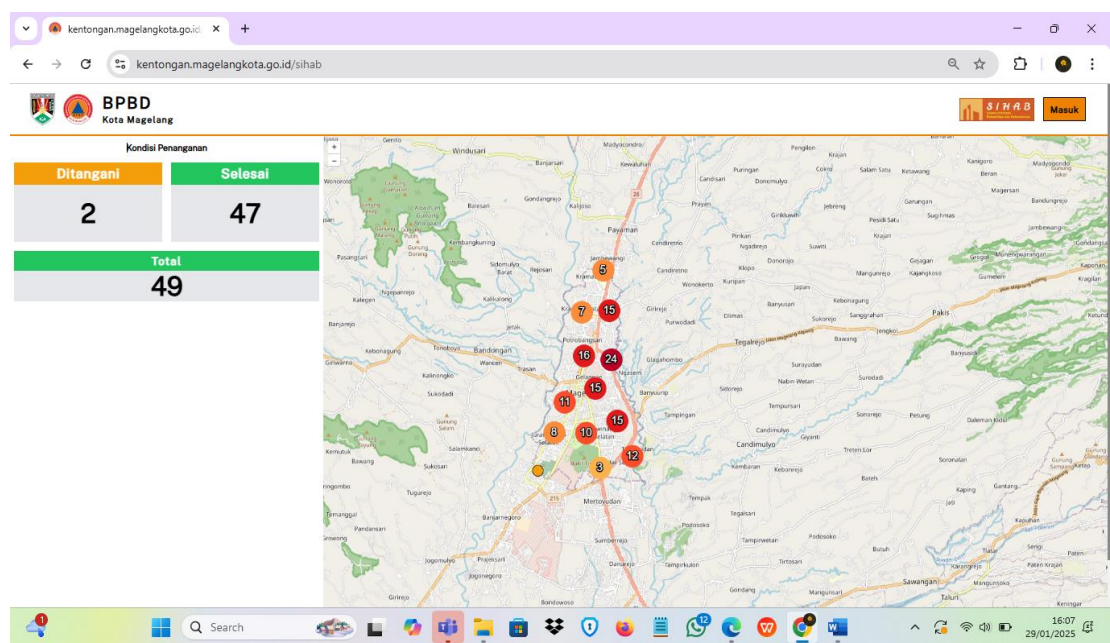
yaitu informasi tentang kaji cepat kejadian bencana, informasi tentang OPD yang berperan serta dalam penanggulangan bencana serta informasi tentang penanganan kejadian bencana. Bersama dengan tim jitupasna informasi tentang kerugian akibat bencana juga dituangkan dalam aplikasi ini. Untuk informasi yang ditampilkan pada saat pascabencana yaitu informasi tentang kerugian akibat bencana, informasi progress penanganan kejadian bencana setelah masa tanggap darurat selesai. Informasi tentang kejadian bencana ini dapat diakses oleh publik sehingga diharapkan akan menjadi salah satu dasar dalam pengambilan keputusan sebagai langkah dari pengurangan resiko bencana. Informasi-informasi yang terhimpun tersebut akan dapat mengurangi dampak bencana.

Gambar 3.4.1 Aplikasi Kentongan



2. SIHAB merupakan aplikasi yang berbasis Web, para stakeholder dapat melihat informasi penanganan pasca bencana sesuai titik koordinat kejadian dengan tanda berwarna hijau untuk yang telah selesai di tangani dan berwarna kuning yang belum selesai tertangani atau tidak dapat ditangani dilengkapi kendala/ hambatan dalam penanganannya. Aplikasi telah dicantumkan dalam Website BPBD Kota Magelang dan dapat diakses melalui alamat <https://bpbd.magelangkota.go.id/> yang dilengkapi fasilitas fitur saran dan masukan, sehingga masyarakat atau stakeholder dapat menyampaikan permasalahan, saran masukan melalui fasilitas dimaksud dengan nama disamarkan/ anonym.

Gambar 3.4.2 Aplikasi Berbasis Web SIHAB



3. **SOSIS BLUTUK** : dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan KIE daerah rawan bencana Kota Magelang maka BPBD Kota Magelang menerapkan sistem yang disebut SOSIS BLUTUK (Sosialisasi Blusukan Turut Kelurahan). Kegiatan ini merupakan kegiatan yang melibatkan berbagai elemen baik para tenaga ahli sebagai narasumber yang berkompeten di bidangnya serta warga masyarakat yang berada pada daerah rawan bencana. Rencana kegiatan akan dilaksanakan pada 17 Kelurahan di Kota Magelang secara bertahap sebagai salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dimana salah satunya pemerintah wajib melaksanakan pelayanan dasar bidang bencana melalui kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi Rawan Bencana dengan sasaran seluruh warga negara pada daerah rawan bencana khususnya yang tinggal di Wilayah Kota Magelang.
- Kegiatan ini dilaksanakan sebagai salah satu terobosan untuk mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan KIE yang sebelumnya dilaksanakan secara terpusat dengan kehadiran peserta yang kurang tepat sasaran sebagaimana ketentuan, dengan adanya SOSIS BLUTUK maka pelaksanaan kegiatan KIE dilakukan dengan metode mendatangi lokasi rawan bencana sesuai dokumen Kajian Resiko Bencana Kota Magelang 2023-2027. Pada tahun 2023 dilaksanakan dengan pendekatan lokasi kegiatan pada Tingkat kelurahan, kedepan akan dilaksanakan dengan pendekatan pada lokasi warga Masyarakat yang tinggal pada wilayah rawan bencana baik pada Tingkat RT maupun RW. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi pada masyarakat yang bertempat tinggal pada daerah rawan bencana tentang potensi resiko bencana pada lokasi tersebut

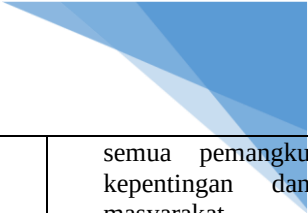
sesuai hasil Kajian Resiko Bencana serta informasi dan edukasi tentang bagaimana mitigasinya serta kesiapsiagaan masyarakatnya.

3.5 Lintas Sektoral

Tabel 3.5 Inventarisasi Lintas Sektor Perangkat Daerah

No	Kegiatan Lintas sektor	Kontribusi Para Pihak		Output dan Kelompok Sasaran		Manfaat
		Pihak	Kontribusi	Output	Kelompok Sasaran	
1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana	1. Kepala Daerah 2. DPRD 3. Akademisi 4. Bagian Hukum 5. Biro Hukum Prov Jateng 6. Kemenkumham Jateng 7. OPD, lembaga Kemasyarakatan, Organisasi Relawan, Tokoh Masyarakat, Media	Penetapan Perda Pembahasan Rancangan Perda Penyusunan Naskah Akademis dan draft Perda Fasilitasi Pembahasan dan Legal Drafting Verifikasi dan pendalaman legal drafting Verifikasi dan pendalaman legal drafting FGD pengumpulan muatan lokal draft Raperda	Perda Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Pemerintah, Masyarakat dan kelompok swasta	1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana 2. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana serana terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh 3. Menghargasi karakter daerah dan budaya masyarakat 4. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta 5. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kederamawanan; dan 6. Menciptakan kedamaian dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat
2	Penyusunan Dokumen Kajian Risiko Bencana	1. BNPB 2. BPBD Prov Jateng 3. Akademisi 4. DLH, DKK, Satpol, Dishub, Dinsos, DPUPR, Disperkim, Bag Kesra, Kecamatan 5. Kelurahan 6. Lembaga Kemasyarakatan, Media, Organisasi Relawan, Tokoh Masyarakat, Pusat Study kebencanaan	Asistensi/ pendampingan Asistensi/ pendampingan Konsultan penyusun Tim Teknis Penyusunan dok KRB Pendamping Survei Indeks Kapasitas Masyarakat (IKM) PB FGD Potensi Kebencanaan	Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Magelang	Pemerintah, Masyarakat dan kelompok swasta	1. Pada tatanan pemerintahan , hasil pengkajian risiko bencana digunakan sebagai dasar untuk menyusun kebijakan penanggulangan bencana, yang nantinya merupakan dasar bagi penyusunan Rencna Penanggulangan Bencana yang merupakan mekanisme untuk mengarusutamakan penanggulangan bencana dalam rencana pembangunan 2. Pada tatanan mitra pemerintah, hasil

		7. Bagian Hukum	Fasilitasi Penyusunan Perwal legalisasi KRB			pengkajian risiko bencana digunakan sebagai dasar untuk melakukan aksi pendampingan maupun intervensi teknis langsung ke komunitas terpapar untuk mengurangi risiko bencana. 3. Pada tatanan masyarakat umum, hasil dari pengkajian risiko bencana digunakan sebagai salah satu dasar untuk menyusun aksi praktis dalam rangka kesiapsiagaan, seperti menyusun rencana dan jalur evakuasi, pengambilan keputusan daerah tempat tinggal dsb
3	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	1. BNPB 2. BPBD Prov Jateng 3. Akademisi 4. DLH, DKK, Satpol, Dishub, Dinsos, DPUPR, Disperkim, Bag Kesra, Kecamatan 5. Kelurahan 6. Lembaga Kemasyarakatan, Media, Organisasi Relawan, Tokoh Masyarakat, Pusat Study kebencanaan 7. Bagian Hukum	Asistensi/ pendampingan Asistensi/ pendampingan Konsultan penyusun Tim Teknis Penyusunan dok KRB Pendamping Survei Indeks Kapasitas Masyarakat (IKM) PB FGD Potensi Kebencanaan Fasilitasi Penyusunan Perwal legalisasi KRB	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana tahun 2019-2023	Pemerintah, Masyarakat dan kelompok swasta	1. Memberikan panduan dan kerangka kerja kepada semua pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana di Kota Magelang, agar kegiatan penanggulangan bencana dapat terencana, terpadu, terkoordinasi dan sinergi 2. Mengidentifikasi daerah berisiko tinggi dan berbagai potensi bencana yang terdapat di Kota Magelang 3. Menyusun dan merencanakan tindakan-tindakan penanggulangan bencana yang perlu menjadi perhatian, termasuk prioritas program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 tahun kedepan 4. Membangun kesadaran, pemahaman, kesatuan pola pikir, dan integrasi tindakan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, bagi



						semua pemangku kepentingan dan masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana di Kota Magelang
4	Penyusunan Dokumen Rencana Kontijensi			Rencana Kontijensi Angin, Longsor dan Karhutla	Pemerintah, Masyarakat dan kelompok swasta	Sebagai landasan strategi, operasional dan pedoman dalam penanganan darurat bencana dan sebagai dasar untuk pengeralahan sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan yang terlibat dalam penanggulangan bencana di wilaah Kota Magelang

BAB IV

PENUTUP

bab IV berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Langkah –
Langkah
Perbaikan
Kinerja*

Keberhasilan Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang tahun anggaran 2024 tidak lepas dari adanya kerjasama , komitmen yang dapat meningkatkan pencapaian kinerja.

A. Setelah penyajian Laporan kinerja Badan Panangggulangan Bencana Daerah Kota Magelang Tahun 2024 dapat disimpulkan :

1. Capaian Kinerja Program tercapai 100 % dengan indikator Presentase Layanan Penanggulangan Bencana dengan definisi operasionalnya , Jumlah kejadian bencana yang tertangani di bagi jumlah kejadian bencana di kali 100% = 56 kejadian bencana dibagi 56 di kali 100% = 100%
2. Capaian kinerja sasaran “ Meningkatkan Ketahanan Daerah dalam menghadapi bencana dengan indikator Indeks Ketahanan Daerah tercapai 48 dari target 47.40 sehingga capaiannya sebesar 101.27% yang terdiri dari tujuh paramater :
 - Indeks Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan tercapai : 0.79
 - Indeks Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu tercapai : 0.70
 - Indeks Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik tercapai : 0.63
 - Indeks Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana tercapai : 0.75
 - Indeks Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana tercapai : 0.44
 - Indeks Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan darurat Bencana tercapai : 0.34 dan
 - Indeks Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana tercapai : 0.36

B. Selanjutnya langkah – langkah kedepan untuk mencapai target :

1. Pembentukan Forum Pengurangan Risiko Bencana
2. Pembentukan Satuan Pendidikan Aman Bencana
3. Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (Pemutakhiran dari dokumen yang telah ada th 2019 – 2023 , yang disusun oleh BAPPEDA Kota Magelang)
4. Legalisasi atas dokumen pengurangan risiko bencana yang terdiri Dokumen Kajian Risiko Bencana, dan 3 Dokumen Rencana Kontijensi , Banjir Longsor dan Karhutla
5. Penyusunan kajian kebutuhan Logistik dan Peralatan dan legalisasinya
6. Penyusunan Keputusan Wali Kota Magelang tentang SOP
7. Penyusunan Peraturan Wali Kota Magelang tentang Pemberian Bantuan Darurat Bencana sebagai dasar penganggaran bantuan yang jelas untuk korban/terdampak bencana sehingga tidak selalu bergantung kepada bantuan dari PMI dan BAZNAS Kota Magelang dan
8. Integrasi penyebaran informasi kebencanaan daerah dengan sistem informasi kebencanaan di tingkat nasional.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Magelang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja BPBD Kota Magelang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain untuk menentukan kebijakan agar penyelenggaraan penanggulangan bencana lebih baik dan akuntabel dan meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana di Kota Magelang.

Magelang, 31 Januari 2025

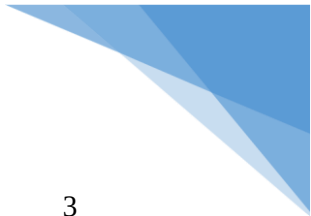
Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kota Magelang



MACHBUB WANI ARFIAN, S.Pd
NIP. 19651203 198902 1 005

DAFTAR TABEL

Tabel I.5.1.1	ASN Berdasarkan Jabatan dan Bolongan	18
Tabel I.5.1.2	ASn Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	19
Tabel I.5.1.3	Pegawai Non ASN Berdasarkan Pendidikan dan Jenis kelamin	19
Tabel I.5.1.4	Jumlah Kebutuhan Pegawai Dibandingkan Kondisi Riil	19
Tabel I.5.2.1	Sarana Prasarana	20
Tabel I.5.3.1	Ringkasan APBD SKPD BPBD Kota Magelang Tahun 2024	24
Tabel I.5.3.2	Anggaran BPBD Kota magelang Tahun 2024	25
Tabel I.6	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKOP Tahun 2023	28
Tabel 2.1	Sasaran Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA)	30
Tabel 2.2	Strategi dan Arah Kebijakan	30
Tabel 2.3	Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2024	31
Tabel 2.4.1	Perjanjian Kinerja Kepala Pelaksana BPBD Kota Magelang Tahun 2024.....	34
Tabel 2.4.2	Program dan Kegiatan yang Mendukung Sasaran Tahun 2024	35
Tabel 2.4.3	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024	35
Tabel 2.4.4	Program dan Kegiatan Perubahan yang Mendukung Sasaran Tahun 2024	35
Tabel 3.1.1	Skala Nilai Perangkat daerah	43
Tabel 3.1.2	Capaian Kinerja BPBD Kota Magelang Tahun 2024.....	44
Tabel 3.1.3	Rumusan Indikator dan Formula Perhitungan	45
Tabel 3.1.4	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 Terhadap Sasaran	46
Tabel 3.1.5	Capaian Program, Kegiatan Tahun 2024 Terhadap Sasaran	47
Tabel 3.2.1	Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana	52
Tabel 3.2.2	Capaian Kinerja Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)	53
Tabel 3.2.3	Kontribusi Sasaran Perangkat Daerah Terhadap Capaian Sasaran Pemerintah Kota Magelang	53
Tabel 3.2.4	Kontribusi Program Perangkat Daerah Terhadap Capaian sasaran Pemerintah Kota Magelang	54
Tabel 3.3	Realisasi Anggaran	55
Tabel 3.5	Inventaarisasi Lintas sektor Perangkat Daerah	58



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	Cascading Kinerja	3
Gambar I.2	Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis	4
Gambar I.3	Struktur Organisasi BPBD Kota Magelang	9
Gambar 2.5.1	Smart Magelang	36
Gambar 2.5.2	Website BPBD Kota Magelang	37
Gambar 2.5.3	Instagram BPBD Kota Magelang	38
Gambar 2.5.4	Twintter/X	39
Gambar 3.4.1	Aplikasi Kentongan	56
Gambar 3.4.2	Aplikasi Berbasis Web SIHAB	57